

**ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG PERAN LEMBAGA BANTUAN
HUKUM DALAM SOSIALISASI HUKUM
(Studi di Desa Cipadang Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:
WILDA ZARA YUNITA
NPM : 1421020232

Program Studi : Siyasah



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1440 H / 2019 M**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG PERAN LEMBAGA BANTUAN
HUKUM DALAM SOSIALISASI HUKUM (STUDI DESA CIPADANG
KECAMATAN GEDONG TATAAN KABUPATEN PESAWARAN)**

Skripsi

Diajukan untuk melengkapi Tugas-tugas dan memenuhi Syarat-syarat

Guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum



FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1440 H/ 2019 M

ABSTRAK

Di desa Cipadang Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, Lembaga Bantuan Hukum tidak bergerak aktif dalam mensosialisasikan hukum dalam masyarakat, sedangkan menurut teorinya Lembaga Bantuan Hukum seharusnya perlu adanya sosialisasi hukum kepada masyarakat. Keadaan yang terjadi di desa Cipadang dengan yang seharusnya terdapat ketidaksamaan. Oleh sebab itu perlu diteliti permasalahan yang terjadi.

Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Bantuan hukum merupakan suatu media yang dapat digunakan oleh semua orang dalam rangka menuntut haknya atas adanya perlakuan yang tidak sesuai dengan kaedah hukum yang berlaku. Pemberi bantuan hukum oleh Lembaga Bantuan Hukum memiliki peranan yang sangat besar yaitu untuk mendampingi *kliennya* sehingga dia tidak akan diperlakukan dengan sewenang-wenang oleh aparat, demikian juga untuk membela dalam hal materinya yang mana di sini diharapkan dapat tercapainya keputusan yang mendekati rasa keadilan dari pengadilan.

Permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini yakni bagaimana peran lembaga bantuan hukum di Desa Cipadang dalam sosialisasikan hukum dan bagaimana analisis hukum Islam tentang peran Lembaga Bantuan Hukum. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui peran Lembaga Bantuan Hukum dalam mensosialisasikan hukum dan menganalisis hukum Islam terhadap peran Lembaga Bantuan Hukum.

Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian *field research*. Sifat penelitian bersifat *Deskriptif analitis*. Data di ambil dari dua sumber yaitu data primer dan sekunder. Metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan induktif,

Dari penelitian yang telah dilakukan, dapat ditemukan bahwa peran Lembaga Bantuan Hukum di Desa Cipadang di lapangan nya tidak berjalan dengan baik, karena tidak dilakukan nya sosialisasi hukum kepada masyarakat, dan tidak berjalan dengan baik tentang Hak dan Kewajiban LBH yang seharusnya sesuai dengan Undang-Undang No. 16 tahun 2011. Kemudian menurut ketentuan hukum Islam, LBH di desa Cipadang kurang berjalan menurut yang ditetapkan oleh UU No.16 Tahun 2011, oleh sebab itu seharusnya aparat pemegang kekuasaannya mengikuti anjurannya sebagaimana tertera dalam UU tersebut agar masyarakat mendapatkan pelayanan sebaik-baiknya sebagaimana yang tertera dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah (5) ayat 2. yang menjelaskan bahwa kita diwajibkan tolong menolong dalam kebaikan.



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH

Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Telp (0721) 703531, 780421

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG PERAN
LEMBAGA BANTUAN HUKUM DALAM
SOSIALISASI HUKUM (STUDI DESA CIPADANG,
KECAMATAN GEDONG TATAAN, KABUPATEN
PESAWARAN)

Nama Mahasiswa : Wilda Zara Yunita
NPM : 1421020232
Jurusan : Siyasah
Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasakan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasah
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Dr. Drs. H. M Wagianto, S.H., M.H.
NIP. 196201111994031001

Pembimbing II

Drs. Henry Iwansyah, M.A.
NIP. 195812071987031003

Mengetahui
Ketua Prodi Siyasah

Dr. Nurnazli, S.Ag., S.H., M.H
NIP. 197111061998032005



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Telp (0721) 703531, 780421

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : **ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM DALAM SOSIALISASI HUKUM (Studi di Desa Cipadang Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran)**, telah diajukan dalam sidang munaqosah Fakultas Syariah pada hari/tanggal: Jumat, 21 Juni 2019.

TIM PENGUJI

Ketua sidang : Dra. Firdaweri, M.H.I.

Sekretaris : Hendriyadi, S.H.I., M.H.I.


Penguji I : Drs. Susiadi AS., M. Sos.I.

Penguji II : Dr. Drs. H.M. Wagianto, S.H., M.H.

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Dekan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum


Dr. H. Khairuddin, M.H.
NIP: 196210221993031002

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا
بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”¹

(Q.S. An-nisa (4) : (58))



¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan*, (Bandung: PT. Cordoba Internasional Indonesia), hlm.100

PERSEMBAHAN

Tiada kata yang lebih indah selain rasa syukur penulis kepada Allah SWT, pemberi segalam rahmat bagi setiap makhluknya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis persembahkan hasil karya kecil nan sederhana ini kepada orang-orang yang aku cintai dengan harapan aku mencintai mereka seperti Allah mencintai mereka.

1. Ayahanda tercinta alm. Yubendi YSK, S.P yang telah sangat berjasa dalam hidupku, mengajarku, membimbingku, mendorong dan menasehatiku, serta mendo'akan ku dalam segala hal, semoga kesuksesan ku menjadi hal terindah yang bisa ku persembahkan untuk mu.
2. Ibunda tersayang Maisuri Yurita, S.pd yang tidak pernah berhenti memberikan semangat, doa, dukungan dan kasih sayang yang luar biasa sehingga aku mampu sampai pada tahap ini.
3. Kakak-kakak ku Mellya Fitri Yunida, Amd. Keb, Yovita Mirandila, Amd, Kep, Loutfi Juliansyah, S.E, Chandra Ali Putra, Amd, Kep, dan adik-adik ku Yuliana Sesa Reoza, dan Ikrima Silvi Hadzar, atas kasih sayang, dukungan dan pengertian untuk terus mendukung ku.
4. Muhammad Harenggi, S.H yang sudah terus membantu, menyemangati dan menemani saya hingga sampai pada titik ini.

5. Sahabat-sahabat ku Debra Andini, Fikri Ahmadi, Syfa Satya Revata yang tiada hentinya memberi dukungan untuk ku agar dapat cepat terselesaikan nya skripsi ini.
6. Keluarga Siyasah D 2014, Agustina Tri Widiastuti, Muhammad Harenggi, Maya Armelia, Reska Ismaini, Lia Mareta S, Ariza Rahmawati, Oriza Wulandari, Juwita Tri Utami, Ulvi Maghvirotul D, Ayuna Karlia, Masmita, Rizky Khairul, Achmad Junaedi, Dede Wardana, Budi Santoso, dan seluruh keluarga besar Siyasah D yang telah mendukung, berbagi pengalaman dan ilmu selama menjadi mahasiswa di UIN Raden Intan Lampung



Bandar Lampung, 17 Juni 2019

Penulis

Winda Zara Yunita

RIWAYAT HIDUP

Wilda Zara Yunita dilahirkan di Gedong Tataan pada tanggal 18 Juni 1996, anak ketiga dari lima bersaudara, buah hati dari pasangan Bapak Yubendi YSK, S.P dan Ibu Maisuri Yurita, S.pd

Pendidikan yang pernah penulis tempuh yang pertama yaitu Taman Kanak-Kanak PTPN Way Berulu dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2002. Penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang Sekolah Dasar di SDN 8 Gedong Air selama enam tahun yaitu dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2008. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan tingkat menengah pertama di SMPN 10 Bandar Lampung selama tiga tahun yaitu dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2011. Setelah tamat di pendidikan menengah pertama penulis melanjutkan pendidikan menengah atas di SMAN 9 Bandar Lampng selama tiga tahun yaitu mulai tahun 2011 sampai dengan 2014. Pada tahun yang sama penulis

melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi di Universitas Islam Negeri
Raden Untan Lampung, mengambil program studi Siyasah Fakultas Syari'ah

Bandar Lampung, 17 Juni 2019

Wilda Zara Yunita

NPM: 1421020232



KATA PENGANTAR

Tidak ada kata yang indah selain rasa syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan karuni-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk, sehingga skripsi dengan judul “Analisis Hukum Islam Tentang Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Sosialisasi Hukum (Studi Desa Cipadang Kec. Gedong Tataan Kab. Pesawaran)” dapat diselesaikan. Salawat serta salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat dan pengikut-pengikutnya yang setia.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) jurusan Siyasah Fakultas Syari'ah Universitas

Islam Negeri Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dalam bidang ilmu syari'ah.

Atas bantuan pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa diucapkan terimakasih sedalam-dalamnya. Secara rinci ungkapan terimakasih itu disampaikan kepada:

1. Dr. H. Khairuddin, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan mahasiswa.
2. Dr. Nurnazli, S.Ag., S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Siyasa yang telah memfasilitasi segala kepentingan mahasiswa.
3. Bapak Dr. Drs. H. M Wagianto, S.H, M.H. dan Bapak Drs. Henry Iwansyah, M.A. masing-masing selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dalam membimbing, mengarahkan, dan memotivasi hingga skripsi ini selesai.
4. Bapak dan Ibu Dosen, serta Staf Karyawan Fakultas Syari'ah.
5. Pimpinan dan Karyawan Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Universitas yang telah memberikan informasi, data, referensi dan lain-lain.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan, hal itu tidak lain disebabkan karena keterbatasan kemampuan, waktu, dan data

yang dimiliki. Untuk itu kiranya para pembaca dapat memberikan masukan dan saran-saran, guna melengkapi penulisan ini.

Akhirnya, penelitian ini (skripsi) dapat menjadi sumbangan yang cukup berarti dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, 17 Juni 2019

Penulis,

Wilda Zara Yunita



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
ABSTRAK	iii
PERSETUJUAN.....	iv

MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
PENGESAHAN	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	3
C. Latar Belakang Masalah.....	4
D. Rumusan Masalah	11
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
F. Metode Penelitian.....	12

BAB II BANTUAN HUKUM ISLAM DALAM PERPEKTIF

HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

A. Sejarah dan Dasar Hukum Bantuan Hukum di Indonesia.....	17
B. Jenis-jenis, wewenang, tugas dan fungsi Lembaga Bantuan Hukum di Indonesia	33
C. Mekanisme Bantuan Hukum di Indonesia	40
D. Lembaga Bantuan Hukum dalam Perspektif Islam.....	43

BAB III GAMBARAN UMUM LEMBAGA BANTUAN HUKUM

DI DESA CIPADANG

A. Sejarah Desa Cipadang Kabupaten Pesawaran	61
B. Sejarah Lembaga Bantuan Hukum Desa Cipadang.....	79
C. Struktur Organisasi Lembaga Bantuan Hukum Desa Cipadang	81
D. Pembiayaan Lembaga Bantuan Hukum Desa Cipadang	82
E. Kinerja Lembaga Bantuan Hukum Desa Cipadang.....	83
F. Sosialisasi Hukum di Desa Cipadang	86

**BAB VI ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG LEMBAGA
BANTUAN HUKUM DALAM SOSIALISASI HUKUM
DI DESA CIPADANG KECAMATAN GEDONG TATAAN
KABUPATEN PESAWARAN**

A. Analisis Tentang Peran Lembaga Bantuan Hukum Desa Cipadang Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran.....	89
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Peran Peran Lembaga Bantuan Hukum	94

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	98
B. Saran.....	99

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Persetujuan Skripsi.....	
Lampiran 2 : Surat Izin Riset	
Lampiran 3 : Daftar Wawancara.....	
Lampiran 4 : Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2011.....	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum diadakan pembahasan lebih lanjut tentang skripsi ini, terlebih dahulu penulis akan menjelaskan dengan memberi beberapa istilah yang terkandung di dalam skripsi ini. Adapun judul skripsi ini adalah: **Analisis Hukum Islam Terhadap Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Sosialisasi Hukum (Studi Desa Cipadang Kec. Gedong Tataan Kab. Pesawaran)**. Adapun pengertiannya antara lain:

Analisis, berarti penyidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan) untuk mengetahui keadaan sebenarnya (sebab musabah, duduk perkara). Penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antara bagian untuk memperoleh pengertian pandangan; pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari).²

Hukum Islam menurut ulama *ushul* adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah SWT dan sunnah Rasul tentang tingkah laku

² Pusat Bahasa Departemen Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Balai Pustaka, 2003), hlm. 189

manusia *mukallaf* yang diakui dan diyakini masyarakat untuk semua hal bagi yang beragama Islam.³

Peran adalah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.⁴

Lembaga Bantuan Hukum adalah suatu badan yang didirikan dengan tujuan memberikan pelayanan bantuan hukum secara gratis (cuma-cuma) kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum.⁵

Sosialisasi adalah proses belajar seorang anggota masyarakat untuk mengenal dan menghayati kebudayaan masyarakat dalam lingkungannya⁶

Hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah⁷

Desa Cipadang Kec. Gedong Tataan Kab. Pesawaran, salah satu desa yang berada di Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran ini memiliki luas wilayah sekitar 4,5 km. Di desa ini memiliki 12 dusun dan 39 RT , desa ini berdampingan dengan Kecamatan Way Lima. Desa Cipadang memiliki Topografi wilayah lembah. Sumber penghasilan utama sebagian besar penduduk desa Cipadang adalah bertani dan sebagian bekerja sebagai karyawan swasta.

³ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta, PT. Logos Wavana Ilmu, , 1997), hlm. 5.

⁴ Pusat Bahasa Departemen Nasional, *Op. Cit*, hlm. 634.

⁵ KBBI Online, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, tanggal 26 Juli 2019

⁶ Pusat Bahasa Departemen Nasional, *Op. Cit.*, hlm. 869.

⁷ *Ibid.*, hlm 563.

Berdasarkan pengertian-pengertian yang diatas, yang dimaksud dengan Analisis Hukum Islam Terhadap Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Sosialisasi Hukum Terkait Pemerintahan (Studi Desa Cipadang Kec. Gedong Tataan Kab. Pesawaran adalah menguraikan suatu materi atau informasi tentang bagaimana peran Lembaga Bantuan Hukum dalam mensosialisasikan hukum terutama yang terkait dengan Pemerintahan di masyarakat khususnya Desa Cipadang Kec. Gedong Tataan Kab. Pesawaran dilihat pula dalam Perspektif Hukum Islam.

B. Alasan Memilih Judul

1. Alasan Objektif

Menganalisis bagaimana peran Lembaga Bantuan Hukum dalam mensosialisasikan terkait Pemerintahan di dalam masyarakat Desa Cipadang Kec. Gedong Tataan Kab. Pesawaran. Karena Bantuan Hukum memiliki andil yang besar dalam menyampaikan pengetahuan tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia.

Memahami dan memperluas wawasan terkait peran lembaga bantuan hukum di Desa Cipadang Kec. Gedong Tataan Kab. Pesawaran dan memahami peran lembaga bantuan hukum dalam perspektif hukum Islam terhadap terwujudnya hak asasi manusia.

2. Alasan Subjektif

Alasan subjektif yang mendasari dipilihnya judul ini adalah bahwa kurang nya pemahaman dalam masyarakat tentang seberapa pentingnya peran Lembaga Bantuan Hukum dalam masyarakat terhadap hak asasi manusia terutama bagi kalangan masyarakat menengah kebawah.

Permasalahan ini masih belum ada yang membahasnya khususnya di Fakultas Syari'ah UIN RADEN INTAN LAMPUNG, selain itu juga sebagai syarat penulis dalam menyelesaikan strata satu dan sesuai dengan bidang keilmuan yang penulis tekuni sebagai mahasiswa Fakultas Syari'ah jurusan Siyasah.

C. Latar Belakang

Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Bantuan hukum merupakan suatu media yang dapat digunakan oleh semua orang dalam rangka menuntut haknya atas adanya perlakuan yang tidak sesuai dengan kaedah hukum yang berlaku.

Bantuan hukum tidak secara tegas dinyatakan sebagai tanggung jawab negara namun ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu termasuk hak atas Bantuan Hukum.

Undang-undang No. 16 Tahun 2011 Bab IV pasal 9 tentang bantuan hukum menyebutkan penyelenggaraan bantuan hukum pemberi bantuan hukum berhak:

1. Melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum;
2. Melakukan pelayanan;
3. Menyelenggarakan bantuan hukum, penyuluhan hukum, bantuan hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan bantuan hukum;
4. Menerima anggaran dari negara untuk melaksanakan bantuan hukum sesuai dengan undang-undang ini;
5. Mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Mendapatkan informasi dan data lain dari pemerintah atau instansi lain untuk kepentingan pembelaan perkara; dan
7. Mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian bantuan hukum.

Kegiatan bantuan hukum khususnya bagi masyarakat miskin dan buta hukum yang tampak semakin meluas dan memasyarakat, suatu pandangan kritis terhadap konsep-konsep bantuan hukum yang kini dikembangkan di Indonesia banyak dikemukakan oleh kalangan hukum, baik teoritis, praktisi,

maupun kalangan ilmuan sosial. Bantuan hukum merupakan salah satu cara untuk pemerataan keadilan yang penting artinya bagi pembangunan hukum.

Seseorang terkena musibah berperkara, orang tersebut konsentrasinya terpecah-pecah atau bercabang-cabang, serta seringkali menunjukkan sifat emosional yang menonjol dari pada ketenangan. Akibatnya, seseorang tidak dapat berfikir secara rasional lagi. Banyak orang pandai, dan memiliki keahlian dalam bidang hukum, jika ia terkena musibah berperkara masih tetap membutuhkan penasehat hukum. Sebagai pengakuan hak individu (*individual right*), prinsip persamaan dihadapan hukum (*equality before the law*) dijamin dalam sistem hukum Indonesia. Persamaan ini tidak mengenal pengecualian.

Cara-cara pemerintah atau negara campur tangan berpengaruh terhadap realisasi tujuan bantuan hukum, yakni perlindungan hukum yang merata, sehingga timbul dua model (sistem) bantuan hukum, yakni yuridis-individual dan model kesejahteraan. Pada model yuridis-individual masih terdapat ciri-ciri pola klasik dari bantuan hukum. Artinya permintaan akan bantuan hukum atau perlindungan hukum tergantung pada warga masyarakat yang memerlukannya. Warga masyarakat yang memerlukan bantuan hukum menemui pengacara dan memberikan imbalan atas jasa-jasa yang diberikan dari negara.

Model kesejahteraan memandang bantuan hukum sebagian dari haluan sosial, misalnya untuk menetralkan ketidakpastian atau kemiskinan. Pada model ini dituntut campur tangan yang intensif dari negara dan

pemerintah. Kewajiban-kewajiban negara atau pemerintah untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar warga masyarakat menimbulkan hak-hak tertentu, seperti bantuan hukum yang merupakan salah satu cara memenuhi hak-hak tersebut.

Salah satu tujuan bantuan hukum adalah mendukung pembangunan suatu sistem hukum nasional. Selain itu yang hendak dicapai ialah suatu rasa tanggung jawab yang lebih besar dari petugas-petugas birokrasi dalam melaksanakan fungsinya mengabdikan pada masyarakat. Program bantuan hukum ditujukan untuk memperkuat profesi hukum, menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan maupun pertauran kesejahteraan sosial yang lebih efektif.

Kewajiban-kewajiban pemberi bantuan hukum yang harus dilaksanakan di masyarakat pun sudah dijelaskan dalam perundang-undangan, begitu pun hak masyarakat dalam menerima bantuan hukum untuk penyelesaian perkara dengan Cuma-Cuma sangat diutamakan oleh pemerintah.

Kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat yang rendah dapat berupa ketidakmengertian masyarakat akan hukum yang berlaku maupun karena ketidaktahuan mereka atas bantuan hukum yang merupakan hak dari orang miskin yang dapat diperoleh tanpa bayar, sehingga setiap orang dapat memperoleh haknya untuk mendapatkan layanan hukum, yang kaya ataupun berkecukupan dapat menyewa jasa pengacara maupun orang miskin yang

tidak dapat menyewa jasa pengacara tetap dapat menerima bantuan hukum sebagai penjabaran persamaan hak dihadapan hukum.

Perkembangan dari bantuan hukum ini juga memunculkan suatu Lembaga Bantuan Hukum sebagai salah satu gerakan bantuan hukum di Indonesia karena cirinya yang sangat dinamik dan juga cara pengelolaannya juga lebih profesional dibandingkan dengan pengelolaan di biro-biro konsultasi hukum yang dijalankan oleh fakultas hukum baik itu swasta maupun negeri.

Keberadaan Lembaga Bantuan Hukum sangat penting di dalam masyarakat mengingat prinsip persamaan di depan hukum. Apalagi dengan sebagian besar masyarakat kita masih hidup di bawah garis kemiskinan, dan minimnya pengetahuan hukum masyarakat juga merupakan hambatan dalam menerapkan hukum di masyarakat. Terlebih lagi budaya hukum dan tingkat kesadaran hukum masyarakat Indonesia yang masih sangat rendah.

Lembaga Bantuan Hukum juga berperan dalam mensosialisasikan pengetahuan hukum dalam masyarakat. Pemahaman masyarakat akan hukum dan Pemerintahan yang minim mengakibatkan ketidaktahuan masyarakat akan hak-hak dan kewajiban mereka dalam bermasyarakat.

Lembaga Bantuan Hukum selain karena mengusung konsep yang baru dalam pelaksanaan program bantuan hukum di Indonesia, Lembaga Bantuan Hukum di anggap sebagai cikal bakal bantuan hukum yang berlembaga yang dikatakan paling berhasil pada masanya. Hingga Lembaga Bantuan Hukum

ini kemudian mendorong tumbuhnya berbagai macam bentuk organisasi dan wadah bantuan hukum di Indonesia.⁸

Pemberian kuasa hukum atau perwakilan dalam bidang hukum penekanannya adalah pada bidang hukum penekanannya adalah pada penunjukan seseorang agar melaksanakan suatu kewajiban. Dalam bidang hukum dalam arti sempit, perwakilan bertujuan untuk memberikan kuasa kepada orang lain untuk menyelesaikan (*wakalah*, perwakilan; *muwakil*, yang mewakilkan; *wakil* yang mewakili urusan hukum).

Dalam Islam, seseorang diperkenankan mendelegasikan suatu tindakan tertentu kepada orang lain yang mana orang lain tersebut bertindak atas nama pemberi kuasa atau yang mewakilkan sepanjang kegiatan yang didelegasikan diperkenankan oleh agama.

Selain itu, dalam konsep hukum Islam manusia kedudukannya sama di depan hukum dan berhak mendapatkan jaminan keadilan. Dari konsep itu, pemenuhan hak dan kewajiban hukum menjadi tujuan keadilan hukum. Akan tetapi yang perlu digaris bawahi adalah otoritas pembuat hukum mutlak di tangan Allah SWT, sedangkan penguasa dan rakyat diberi amanat untuk menyelesaikan urusan-urusan publik bersumber pada wahyu dan selebihnya ditentukan oleh manusia sendiri melalui ijtihad berdasarkan prinsip musyawarah.

⁸ T.Mulya Lubis, *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural*, (Jakarta, LP3ES), hlm.15.

Dasar hukum adanya pemberian kuasa hukum dalam berperkara tercakup dalam dasar hukum perwakilan secara umum, antara lain dalam QS an-nisa' ayat 58

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨﴾

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”⁹

Ath-Tahabri menafsirkan ayat tersebut bahwa ayat tersebut adalah seruan dari Tuhan kepada orang yang mengurus kekuasaan kaum muslimin dengan melaksanakan amanat kepada yang memberi tanggung jawab tersebut, dari kewajiban dan hak-haknya. Dan yang diamanatkan mereka kepada pemimpin untuk mengurus segala permasalahan, dan berjanji terhadap mereka untuk melakukan persamaan. Kemudian Ath-Tahabari menerangkan makna keadilan dengan mengatakan bahwa itulah hukum dari Tuhan yang telah diturunkan dalam Al-Qur'an dan diterangkan oleh Rasul-Nya, janganlah kalian melewati batasnya hingga dapat menganiaya.

Masalahnya sekarang adalah bagaimana ketentuan perundang-undangan itu diterapkan di tengah-tengah masyarakat? Apakah dalam praktek semua ketentuan-ketentuan itu telah dilaksanakan dengan baik? Adakah

⁹ Departemen Agama RI, *Op.Cit*, hlm. 87

kendala di lapangan? Semuanya memerlukan kajian tersendiri. Untuk itulah dalam kesempatan ini penulis mengangkat topik tersebut dan membahasnya dalam bentuk skripsi yang berjudul “Analisis Hukum islam Tentang Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Sosialisasi Hukum (Studi Desa Cipadang Kec. Gedong Tataan Kab. Pesawaran)

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran Lembaga Bantuan Hukum Desa Cipadang Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran dalam Sosialisasi Hukum?
2. Bagaimana Analisis Hukum Islam Terhadap Peran Lembaga Bantuan Hukum ?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun Tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui peran Lembaga Bantuan Hukum Desa Cipadang Kec. Gedong Tataan Kab. Pesawaran dalam Sosialisasi Hukum.
2. Untuk menganalisis hukum Islam Terhadap Peran Lembaga Bantuan Hukum

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Kegunaan secara teoritis untuk mengetahui sejauh manakah pengetahuan masyarakat di Desa Cipadang Kec, Gedong Tataan Kab. Pesawaran terhadap peranan lembaga bantuan hukum di dalam masyarakat
2. Kegunaan praktis yaitu untuk memperluas wawasan bagi penulis untuk memenuhi syarat ujian akhir semester dalam menyelesaikan studi di fakultas Syari'ah.

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan induktif. Alasannya metode kualitatif dengan pendekatan induktif lebih relevan dalam mengolah datanya. Untuk menghasilkan gambaran yang baik, dibutuhkan serangkaian langkah yang sistematis. Adapun langkah-langkah tersebut terdiri atas:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan.¹⁰ Adapun lokasi penelitian ini adalah Desa Cipadang Kec. Gedong Tataan Kab. Pesawaran yaitu sebagai sumber data

¹⁰ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Cetakan ketujuh, CV Mandar Maju, 1996), hlm. 81.

primer, sedangkan sumber data sekunder yaitu buku-buku hukum dan buku-buku lain yang secara langsung maupun tidak langsung ada hubungannya dengan pokok permasalahan.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *Deskriptif Analitis* yang dimaksud dengan deskriptif adalah suatu metode menggambarkan sifat sesuatu yang berlangsung pada saat penelitian dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu secara sistematis dan objektif. Dalam penelitian ini akan digambarkan secara tepat dan jelas bagaimana bentuk peran lembaga bantuan hukum dalam sosialisasi hukum di masyarakat desa Cipadang Kec. Gedong Tataan Kab. Pesawaran.

2. Data dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data tertentu diperoleh. Data merupakan hasil pencatatan yang baik berupa fakta dan angka yang dijadikan bahan untuk menyusun informasi.

Data pada penelitian ini penulis menggunakan sumber data primer dan sekunder.

- a. Data primer, yaitu data penelitian yang diperoleh secara langsung dikumpulkn dai lapangan.¹¹ Data ini umumnya diperoleh dari hasil

¹¹ Zeni Yusarlis, *Tinjauan Hukum Islam tentang Praktek Tengkulak*, IAIN RIL, Bandar Lampung, 2015, hlm 6.

wawancara dengan aparat Desa, masyarakat, para advokat di LBH Desa Cipadang Kec. Gedong Tataan Kab. Pesawaran, dan figur-figur tertentu yang ada di wilayah tersebut.

- b. Data sekunder, adalah data yang diperoleh dari literatur dan tulisan yang berkenaan dengan tema penelitian ini serta data yang ada pada Lembaga Bantuan Hukum di desa Cipadang Kec Gedung Tataan Kab. Pesawaran.

3. Metode Pengumpulan Data

- a. Observasi, adalah tinjauan langsung ke lokasi penelitian sebelum diadakannya penelitian atau pencarian data di lapangan. Metode observasi digunakan oleh seorang peneliti ketika hendak mengetahui secara empiris tentang fenomena objek yang diamati.
- b. Wawancara yang diterapkan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin yaitu pewawancara hanya membuat pokok-pokok masalah yang diteliti, selanjutnya dalam proses wawancara berlangsung mengikuti situasi. Wawancara yang di maksud untuk memperoleh data tambahan dan memperkuat hasil kuesioner dalam penelitian ini.
- c. Dokumentasi, yaitu mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat suatu laporan yang sudah tersedia. Metode ini dilakukan dengan melihat dokumen seperti monografi, catatan serta buku-buku yang ada.

4. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh data ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumus-rumus tertentu. Data yang kemudian dikumpulkan umumnya dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Editing, yaitu pengecekan data yang telah di kumpulkan, karena kemungkinan data yang termasuk atau terkumpul itu tidak logis dan meragukan¹²
- b. Koding, yaitu mengklasifikasikan jawaban-jawaban dari para responden kedalam kategori-kategori¹³ atau memberikan catatan atau tanda yang menyatakan sumber data atau urutan rumusan masalah.
- c. Rekonstruksi data, yaitu menyusun ulang data secara teratur berurutan dan sistematis.
- d. Sistematis Data, yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahan berdasarkan urutan masalah¹⁴

Setelah data terkumpul, di koreksi, di evaluasi dan di olah yang sesuai dengan permasalahan. Setelah itu memberikan catatan khusus berdasarkan dengan permasalahan data dan rumusan masalah. Kemudian

¹² Susiadi, *Metodelogi penelitian*, (Bandar Lampung. Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Lampung, 2015), hlm 115

¹³ *Ibid.*, hlm 115

¹⁴ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. (Bandung PT. Citra Aditya Bhakti 2004), hlm 45

di susun ulang secara teratur sehingga menjadi sebuah pembahasan yang dapat dipahami, dengan menempatkan data secara sistematis sesuai dengan urutan permasalahan, sehingga dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan sebagai hasil dari penelitian.

5. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan melalui instrumen penelitian di maksudkan untuk mengetahui atau menjawab dari pokok-pokok masalah dalam penelitian ini. Analisis data ini di gunakan untuk mengolah data yang telah di temukan peneliti selama melakukan penelitian yang nantinya akan dirumuskan dan dapat mengambil kesimpulan tentang permasalahan yang di teliti

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan tujuan memberi gambaran mengenai situasi yang terjadi dengan menggunakan analisa kualitatif yang bersifat induktif yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh. Dengan demikian dapat di simpulkan bahwa metode deskriptif adalah suatu bentuk menerangkan hasil penelitian yang bersifat memaparkan se jelas-jelasnya tentang apa yang diperoleh di lapangan, dengan cara peneliti melukiskan, memaparkan dan menyusun suatu keadaan secara sistematis sesuai dengan teori yang ada untuk menarik kesimpulan dalam upaya pemecahan masalah.

BAB II

BANTUAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA DAN HUKUM ISLAM

A. Sejarah dan Dasar Hukum Bantuan Hukum di Indonesia

1. Sejarah Bantuan Hukum di Indonesia

Bantuan hukum telah dilaksanakan oleh masyarakat Barat sejak zaman Romawi dimana pada waktu itu bantuan hukum didasarkan pada nilai-nilai moral dan lebih dianggap sebagai suatu pekerjaan yang mulia, khususnya untuk menolong orang-orang tanpa mengharapkan dan/atau menerima imbalan atau honorarium. Setelah meletusnya Revolusi Perancis, bantuan hukum kemudian mulai menjadi bagian dari kegiatan hukum atau kegiatan yuridis dengan mulai lebih menekankan pada hak yang sama bagi warga masyarakat untuk mempertahankan kepentingan-kepentingannya di muka pengadilan dan hingga awal abad ke-20, bantuan hukum ini lebih banyak dianggap sebagai pekerjaan memberi jasa di bidang hukum tanpa suatu imbalan.¹⁵

Di Indonesia, bantuan hukum sebagai salah satu *legal institution* (lembaga hukum) semula tidak dikenal dalam sistem hukum tradisional. Bantuan hukum baru dikenal di Indonesia sejak masuknya atau diberlakukannya sistem hukum Barat di Indonesia. Bermula pada tahun

¹⁵ Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan hak Asasi Manusia*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2009), hlm. 11.

1848 ketika di negeri Belanda terjadi perubahan besar dalam sejarah hukumnya. Berdasarkan asas konkordansi, dengan Firman raja tanggal 16 Mei 1848 No. 1, perundang-undangan baru di negeri Belanda tersebut juga diberlakukan di Indonesia, antara lain peraturan tentang susunan kehakiman dan kebijaksanaan peradilan (*Reglement of de Regterlijke Organisaticen het beleid der Justitie*), yang lazim di singkat dengan R.O.¹⁶

Dalam peraturan hukum inilah diatur untuk pertama kalinya “Lembaga Advokat” sehingga dapat diperkirakan bahwa bantuan hukum dalam arti yang formal baru mulai di Indonesia sekitar pada waktu-waktu tersebut. Pada masa itu, penduduk Indonesia dibedakan atas 3 golongan berdasarkan Pasal 163 Ayat (1) *Indische Staatsregeling* (IS), antara lain:

1. Golongan Eropa.

Yang termasuk golongan ini adalah orang Belanda, semua orang yang bukan Belanda tetapi berasal dari Eropa, orang Jepang, dan anak sah dari golongan Eropa yang diakui undang-undang.

2. Golongan Timur Asing.

Yang termasuk dalam golongan Timur Asing adalah golongan yang bukan termasuk dalam golongan Eropa maupun golongan Bumiputera.

¹⁶ Abdurahman, *Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Cendana Press, 1983), hlm 40

3. Golongan Bumiputera.

Yang termasuk golongan ini adalah orang-orang Indonesia asli (pribumi).¹⁷

Pemberian bantuan hukum sejak zaman kemerdekaan tetap dilakukan oleh advokat dan *procureur*. Pelaksanaan pemberian bantuan hukum tentunya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada khususnya dalam hal ini H.I.R. yang masih tetap berlaku berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945. Hanya saja pemberian bantuan hukum pada waktu itu belum terorganisir dengan baik, dalam arti belum dalam bentuk suatu lembaga khusus untuk itu. Yang ada hanya berbentuk organisasi sosial seperti “Tjandra Naya” di Jakarta dan Fakultas-fakultas Hukum Negeri dan biro-biro konsultasi hukum dalam bentuknya sederhana. Hanya saja usaha-usaha tersebut ketika itu masih terbatas sekali, baik dalam arti orang-orang yang diberikan bantuan hukum hanya terbatas pada golongan keturunan tertentu saja, *Group clients*, ataupun terbatas pada pemberian nasihat hukum dan konsultasi hukum.¹⁸

Pada waktu itu memang dikenal juga adanya para advokat yang pada zaman pemerintah Hindia Belanda banyak memasuki kancah perjuangan pemuda Indonesia merdeka bersama-sama pemuda dan kaum

¹⁷ Pasal 163 Indische Staatsregeling, diakses dari http://id.wikipedia.org/wiki/Pasal_163_Indische_Staatsregeling, pada tanggal 25 September 2018 pukul 19.52.

¹⁸ Abdurahman, *Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*, Op. Cit, hlm 43

terpelajar lainnya. Peranan advokat pada waktu itu bagi pejuang kemerdekaan nasional cukup banyak dikenal dan menjadi perintis kemerdekaan.

Para pelopor advokat Indonesia tersebut dapat disebutkan di sini seperti Mr. Sastroamidjojo, Mr. Sartono, Mr. AA. Maramis, Mr. Laturharhary, Mr. Mohammad Yamin, Mr. Kasman Singodimedjo, dan lain-lain.¹⁹

Advokat tersebut merupakan lulusan pertama advokat Indonesia yang menyelesaikan studi mereka di Universitas Utrecht dan Leiden. Mereka juga adalah perintis perjuangan kemerdekaan Indonesia dan juga pelopor dalam menegakkan hak asasi manusia dan cita-cita Negara hukum Indonesia. Para advokat itu mempunyai peranan yang besar dalam penyusunan dasar-dasar Negara dan falsafah Negara Indonesia.

Periode 1959-1965 atau yang secara populer dikenal sebagai “Periode Presiden Soekarno” atau “Periode Orde Lama” bantuan hukum dan demikian juga profesi advokat di Indonesia mengalami kemerosotan yang luar biasa jika tidak dikatakan hancur sama sekali.

Masa itu peradilan tidak lagi bebas tetapi sudah dicampuri dan dipengaruhi secara sadar oleh eksekutif. Hakim-hakim berorientasi kepada pemerintah karena tekanan yang dalam praktik dimanifestasikan dalam bentuk setiap putusan dimusyawarahkan dulu dengan pihak kejaksaan.

¹⁹ Nasution Adnan Buyung, *Bantuan Hukum di Indonesia*, (LP3ES) hlm. 2.

Akibatnya, tidak ada lagi kebebasan dan kemandirian (*impartiality*) sehingga dengan sendirinya wibawa pengadilan jatuh dan harapan serta kepercayaan pada bantuan hukum hilang.

Saat itu orang yang berperkara tidak melihat gunanya bantuan hukum, juga tidak melihat gunanya profesi advokat yang memang sudah tidak berperan lagi. Orang lebih suka meminta pertolongan kepada jaksa, hakim itu sendiri atau jika ada jalan kepada orang kuat lainnya. Pada saat itu pun banyak advokat yang meninggalkan profesinya.

Sementara itu, sekitar tahun 1959-1960 para advokat yang berasal dari Jawa Tengah berkumpul di Semarang dan sepakat untuk mendirikan organisasi advokat yang dinamakan “BALIE” Jawa Tengah. Ketuanya adalah Mr. Soejoedi dan anggota-anggotanya antara lain adalah Mr. Kho Swan Sik, Mr. Tan Siang Sui, dan Mr. Tan Kie Tjong.

Berkembang pula di daerah-daerah lain dan bermunculan perkumpulan advokat seperti “Balai Advokat” di Jakarta, Bandung Medan dan Surabaya. Perkumpulan yang berdiri di kota-kota besar itu belum dalam bentuk satu wadah kesatuan organisasi Advokat Indonesia.

Usaha pembentukan wadah kesatuan yang sesungguhnya bagi advokat sebenarnya sudah lama direncanakan yaitu semenjak Kongres I PERSAHI (Persatuan Sarjana Hukum Indonesia) pada tahun 1961 di Yogyakarta di mana pada waktu itu hadir para ahli hukum dan advokat sebagai peserta kongres.

Bertepatan dengan saat berlangsungnya Seminar Hukum nasional I pada tanggal 14 maret 1963 di Jakarta dan bertempat di ruang kafetaria Universitas Indonesia, tokoh-tokoh advokat sebanyak 14 orang mencetuskan berdirinya suatu organisaasi advokat yang kemudian dikenal dengan nama Persatuan Advokat Indonesia (P.A.I). Keempat belas orang tersebut adalah Muchni Djojosoeryo dari Surabaya, Hasyim Mahdan, Harsubeno, Suprpto, Padmo Soemasto, Yap Thiam Hien, A.Z. Abidin, Loekman Wiriadinata masing-masing Jakarta; sedangkan Tjio Liang Hoat, Ny. Amarwatiwi saleh masing-masing dari Bandung; Ny. Amar Wirjanto maisng-masing dari Solo; A.S. Soripoda dari Pontianak dan Ny. Ani Abas Manopo dar Medan.

Susunan pengurusnya adalah sebagai berikut:

Ketua: Mr. Loekman Wiriadinata (mantan Menteri Kehakiman)

Penulis: Mr. Harsubeno

Bendahara: Mr. Soemarno P. Wirjanto

Berdirinya P.A.I. tersebut mendapat perhatian dari pemerintah R.I yang kemudian mengundang para pengurus P.A.I. untuk ikut berperan serta dalam penyusunan rancangan undang-undang yang berhubungan dengan lembaga pengadilan dan pelaksanaan peradilan di Indonesia.

Perkembangan berikutnya di daerah-daerah dibentuk organisasi P.A.I. pada pertengahan 1963 dan telah mempunyai tujuh cabang di seluruh Indonesia yang mana pada waktu itu telah beranggotakan lebih

kurang 150 advokat. Sedangkan di Jakarta usaha pembentukan wadah kesatuan advokat dipelopori oleh Mr. Djamaloeddin Datoek Singomangkoeta yang dapat menyusun suatu Rencana Anggaran Dasar dan peraturan Rumah Tangga organisasi PERADIN dan Rencana Kode Etik.

Para advokat tersebut kemudian menyetujui gagasan-gagasan untuk menghimpun para advokat se-Indonesia dalam suatu wadah organisasi profesi Advokat. Oleh karena itu, pada tanggal 29 Agustus 1964 diselenggarakan kongres I/Musyawarah Advokat yang berlangsung di Hotel Dana Solo yang dihadiri oleh para Advokat

Langkah berikutnya dalam membentuk wadah organisasi advokat baru terealisasi pada pertemuan advokat se-Indonesia di Solo pada tanggal 30 Agustus 1964. Keputusan yang penting pada waktu itu adalah:

1. Ketua umum merangkap formatur Dewan Pimpinan Pusat PERADIN adalah Mr. Iskaq Tjokrohadisoerjo (mantan Menteri Perekonomian);
2. Dibentuknya Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga serta Kode Etik;
3. Adanya Rencana Undang-Undang Bantuan Hukum, kedudukan hukum para Advokat Indonesia serta beberapa rancangan Undang-Undang lainnya yang berhubungan dengan Pengadilan dan Peradilan;

Pada saat itulah diresmikan berdirinya Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN) yang semula istilahnya P.A.I. Sebagai salah satu organisasi yang memberikan perhatian pada bantuan hukum maka penting

kiranya untuk mengerti dan memahami MUKADIMAH Anggaran Dasar PERADIN yang berbunyi sebagai berikut;

“BAHWASANYA adalah menjadi hak setiap orang untuk mendapat perlakuan dan perlindungan yang sama oleh hukum, maka oleh karenanya untuk setiap pelanggaran hukum yang dituduhkan padanya serta pembelakangan yang diderita olehnya, berhak pula mendapatkan Hukum, Kebenaran, dan Keadilan, sesuai dengan asas Negara Hukum.”

Tugas profesi seorang Advokat Indonesia adalah untuk dengan bebas dan berani namun penuh rasa tanggung jawab memberikan nasihat dan bantuan hukum, baik di luar maupun di muka pengadilan, kepada setiap orang yang memerlukannya karena terancam jiwanya, kebebasannya, hak milik dan nama baiknya, dengan mencurahkan segenap keahlian yang didasarkan kepada ilmu pengetahuan, sehingga dengan demikian ia turut membantu menegakkan hukum, kebenaran, dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Bantuan dan nasihat hukum yang diberikan oleh seorang Advokat Indonesia itu berdasarkan ilmu pengetahuan dan keahliannya, tidaklah dapat melanggar ketentuan-ketentuan dalam Kode Etik Advokat dan harus didorong oleh cita-cita dan hati nurani yang tulus ikhlas.”

Menghayati hal-hal tersebut dan untuk lebih sempurna melaksanakan tugasnya sebagai pengabdian dan penegak hukum, para Advokat Indonesia berikrar untuk mempersatukan dirinya dalam suatu

perkumpulan profesi yang diberi nama PERSATUAN ADVOKAT INDONESIA (PERADIN) berdasarkan Anggaran Dasar, Peraturan Rumah Tangga, Kode Etik dan ketentuan acara penyelesaian pelanggaran kode etik Advokat sebagaimana dirumuskan bersama ini.

Pendirian PERADIN dimaksudkan agar hanya advokat yang boleh berpraktik di muka persidangan. Proyek besar PERADIN ialah Lembaga Bantuan Hukum Jakarta yang di pimpin oleh Adnan Nasution, S.H., penggerak LBH Jakarta, yang didirikan pada tahun 1970.²⁰

Adnan Buyung Nasution yang tergerak untuk mewujudkan gagasannya kemudiam mengusulkan dalam kongres PERADIN tahun 1969 untuk mendirikan Lembaga Bantuan Hukum. Usul tersebut akhirnya diterima dengan dukungan beberapa advokat senior seperti Loekman Wiriadinata, Suardi Tasrif, Yap Thiam Hien setelah sebelumnya sempat ditentang olehs ejumlah advokat yang kuatir bahwa dikembangkannya bantuan hukum yang bersifat *pro bono* akan menjadi saingan mereka.²¹

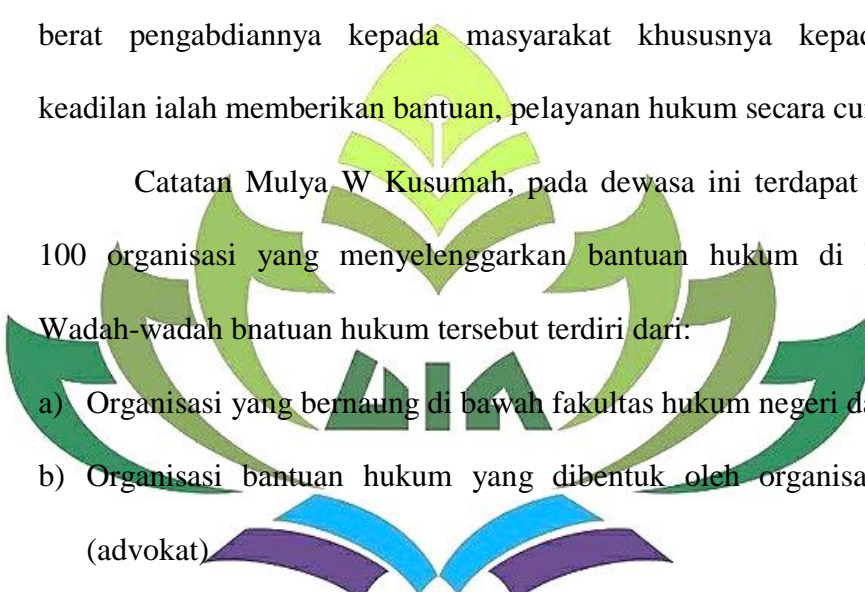
Berdasarkan hasil kongres tersebut, pada tanggal 28 Oktober 1970, PERADIN kemudian membentuk suatu lembaga bantuan hukum yang dikenal dengan nama Lembaga Bantuan Hukum Jakarta. Kelahiran organisaisi bantuan hukum yang kemudian disebut sebagai lembaga bantuan hukum yakni kongres III dari organisasi Perstaun Advokat

²⁰ Martiman Prodjahamidjojo, Penasihat Hukum dan Bantuan Hukum di Indonesia, Latar Belakang dan Sejarahnya, Ghalia Indonesia, 1987, hal 31-32

Indonesia (Peradin) tahun 1969 di Jakarta yang mengesahkan Lembaga Bantuan Hukum. Kemudian diterbitkan Surat Keputusan dari Peradin Tanggal 28 oktober 1970 tentang berdirinya Lembaga Bantuan Hukum DKI Jakarta yang secara fisik berdiri tanggal 1 april 1971.

Nama yang diberikan kepada organisasi bantuan hukum bermacam-macam, ada yang memberikan nama Lembaga Bantuan Hukum, Badan Bantuan Hukum atau Biro Bantuan Hukum, namun titik berat pengabdianya kepada masyarakat khususnya kepad pencari keadilan ialah memberikan bantuan, pelayanan hukum secara cuma-cuma.

Catatan Mulya W Kusumah, pada dewasa ini terdapat lebih dari 100 organisasi yang menyelenggarakan bantuan hukum di Indonesia. Wadah-wadah bantuan hukum tersebut terdiri dari:

- 
- a) Organisasi yang bernaung di bawah fakultas hukum negeri dan swasta
 - b) Organisasi bantuan hukum yang dibentuk oleh organisasi profesi (advokat)
 - c) Organisasi yang dibentuk oleh kelompok- kelompok kepentingan
 - d) Organisasi bantuan hukum yang didirikan oleh kelompok sosial tertentu.

Demi lebih mempermudah para pencari keadilan memperoleh bantuan hukum, organisasi-organisasi bantuan hukm mendirikan posbakum di pengadilan, sehingga keluhan masyarakat dapat ditampung dan dilayani dengan segera. Pada tiap-tiap organisasi bantuan hukum

ditempatkan beberapa sarjana hukum, baik dengan tugas mengelola bantuan hukum dalam pelayanan, pemberian jasa hukum kepada pencari keadilan. Pada umumnya yang diberikan itu ialah:

- a) Nasihat-nasihat dan pelayanan serta penerangan hukum mengenai pihak-pihak, posita, dan duduk perkara masing-masing, akibat hukum, putusan dan pelaksanaan putusan, perdamaian, dsb.
- b) Menjadi pendamping dalam perkara tindak pidana yang tersangkanya sedang/atau akan diperiksa oleh penyidik atau menjadi pembela dalam perkara tindak pidana yang terdakwa sedang/ akan diperiksa pengadilan
- c) Menjadi kuas atau wakil dari pencari keadilan dalam perkara perdata. Sehingga tips bantuan atau pelayanan hukum harus diberikan dengan keterampilan hukum yang disertai oleh rasa tanggung jawab tanpa memberikan harapan bahwa perkaranya akan dimenangkan olehnya.

LBH didirikan dengan konsep awal melindungi masyarakat dari penindasan hukum yang kerap menimpa mereka. Konsep ini kemudian dituangkan dalam Anggaran Dasar LBH.

Tanggung jawab yang dipikul Adnan Buyung ketika itu teramat besar, ia harus berkonsentrasi mengorganisasikan LBH dan juga mengatasi masalah-masalah finansial guna kelangsungan organisasi tersebut. Tidak sedikit orang yang meragukannya dan berpendapat bahwa LBH tidak akan bertahan lama dan secara perlahan tenggelam karena

kehabisan minat, tenaga, serta dana. Pada awalnya memang LBH mendapat dukungan dari Pemerintah DKI Jakarta, ketika Ali Sadikin menjadi gubernur. Salah satu wujudnya dalam bentuk dukungan dana.

Namun ternyata pembentukan LBH di Jakarta ini malah memicu berdirinya organisasi-organisasi serupa di Yogyakarta, Surabaya, Bandung, dan Medan. Tahun 1980 dalam pertemuan nasional LBH disepakati untuk menyamakan serta menyatukan visi dan misi lembaga bantuan hukum, kemudian membentuk Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).

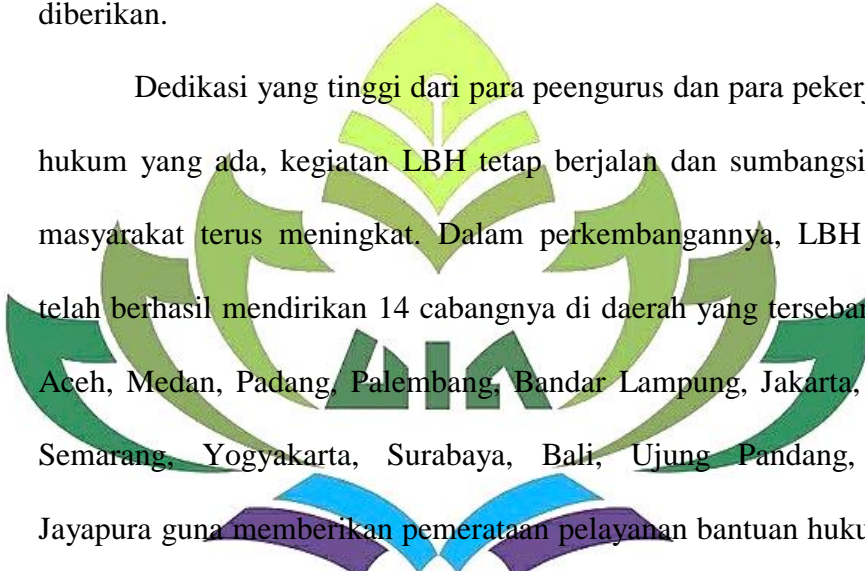
Selama kurun waktu antara 1971-1986 saja, LBH Jakarta menerima sekitar 25.000 perkara sedangkan YLBHI menerima sekitar 60.000 perkara.²² Pada masa ini kegiatan bantuan hukum kembali mendapat kepercayaan masyarakat dan semakin berkembang. Adapun berdasarkan komposisi dari perkara yang ditanganinya, LBH pada awal-awal kegiatannya terlibat dalam 54,4 persen perkara perdata; 10,2 persen masalah tanah; 14,9 persen perkara perburuhan dan 20,48 persen kasus kriminal.²³

Sejalan dengan perkembangan pemikiran dan kesadaran rakyat akan hak-hak sipil dan politiknya sebagai warga negara, kegiatan LBH dalam memberikan bantuan hukum turut mengalami pergeseran di mana

²² Mulyana, W Kusumah, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*. (Jakarta: PT Elex Media, 2000), hlm. 86

²³ *Ibid.*

pemberdayaan hak sipil dan politik rakyat telah menjadi inti dari kegiatan bantuan hukum LBH. LBH tidak segan-segan dan menjadi lebih aktif melancarkan kritik terhadap tindakan otoriter penguasa Orde Baru yang sering kali merugikan rakyat. Akibatnya pemerintah ketika itu menganggap LBH sebagai musuh yang dapat mengancam posisinya. Ruang kerja LBH dibatasi bahkan banyak aktivisnya yang ditangkap, dan belakangan pemerintah menghentikan kontribusi pendanaan yang pernah diberikan.



Dedikasi yang tinggi dari para pengurus dan para pekerja bantuan hukum yang ada, kegiatan LBH tetap berjalan dan sumbangsihnya bagi masyarakat terus meningkat. Dalam perkembangannya, LBH (YLBHI) telah berhasil mendirikan 14 cabangnya di daerah yang tersebar di Banda Aceh, Medan, Padang, Palembang, Bandar Lampung, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Ujung Pandang, Manado, Jayapura guna memberikan pemerataan pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat Indonesia. Selain itu YLBHI juga didukung 10 Pos Bantuan Hukum yang tersebar di Malang, Timika, Merauke, Kisaran, Langkar, Asahan, Rantau Prapat, Lhokseumawe, dan Tanah Toraja.

Perkembangan berikutnya bahkan ada Pernyataan Bersama antara Menteri Panglima Angkatan Darat selaku Panglima Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban, dengan Menteri Kehakiman/Ketua Mahkamah Agung, dan Pimpinan PERADIN Pusat tertanggal 3 Mei 1966 yang

menegaskan bahwa dalam bagian pertimbangan pernyataan tersebut bahwa Persatuan Advokat Indonesia adalah organisasi satu-satunya dari para Advokat di Indonesia. Pernyataan bersama itu ditandatangani oleh Letnan Jenderal Soeharto yang menjabat sebagai Menteri Panglima Angkatan Darat selaku Panglima Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban, Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. selaku Menteri Kehakiman/Ketua Mahkamah Agung, serta Soekardjo Adidjojo, S.H. selaku Wakil Ketua Persatuan Advokat Pusat. Tetapi perkembangannya ternyata Soeharto, Presiden Republik Indonesia ke-2, tidak menepati janjinya dan akhirnya para advokat bergabung dalam satu organisasi advokat yang kemudian dikenal sebagai Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) yang berdiri pada tanggal 10 November 1985.

2. Dasar Hukum Bantuan Hukum di Indonesia

Segala muatan produk hukum dari yang tertinggi hingga yang paling rendah dalam hal hirarki, tidak akan terlepas dari dasar hukum Negara ini yaitu Pancasila sebagai dasar Negara secara filosofis dan yuridis, begitupun dalam hal implementasi terhadap dasar dibuatnya undang-undang yang mengatur tentang lembaga bantuan hukum ini sebagai jawaban sekaligus penjabaran dari Pancasila tepatnya sila ke-2, dan sila ke-5 yang didalamnya mengandung makna penjaminan keadilan

dan persamaan sosial. Oleh karena itu dibuatlah undang-undang yang mengatur tentang bantuan hukum seperti:

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 27 ayat satu yang menyebutkan “setiap warga negara sama kedudukannya dalam hukum, dan pemerintahan serta wajib menjunjung pemerintah tersebut dan hukum tanpa terkecuali”. Penjabaran atas Undang-Undang Dasar pasal 27 ayat 1 ini secara singkat adalah hak setiap warga Negara untuk dibela (*accses to legal counsel*) diperlakukan sama di depan hukum (*equality before the law*) dan keadilan untuk semua (*justice for all*).
2. Undang-undang nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman pasal 56 menyebutkan “setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum dan negara menanggung biaya perkara bagi yang tidak mampu.”²⁴
3. Undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat. Pasal 22 ayat 1 yang menyebutkan “advokat wajib memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu”.²⁵
4. Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan ke dua atas undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama pasal 60 B menyebutkan:

²⁴ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 56

²⁵ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

- a. Ayat 1 menyebutkan bahwa setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum,
- b. Ayat 2 menyebutkan bahwa negara menanggung biaya perkara bagi para pencari keadilan yang tidak mampu,
- c. Ayat 3 menyebutkan bahwa pihak yang tidak mampu sebagaimana dimaksud ayat 2 harus menyertakan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan tempat domisili yang bersangkutan.

5. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 10 tahun 2010 tentang pedoman pemberian bantuan hukum pasal 17 menyebutkan:

- a. Ayat 1 menyebutkan bahwa jenis bantuan hukum yang diberikan oleh pos bantuan hukum berupa pemberian informasi, konsultasi, advis, dan pembuatan surat gugatan/pemohonan.
- b. Ayat 2 menyebutkan bahwa jenis jasa hukum seperti pada ayat 1 diatas dapat diberikan pada penggugat/pemohonan dan tergugat atau termohon
- c. Ayat 3 menyebutkan bahwa pemberian jasa hukum kepada penggugat/pemohon dan tergugat atau termohon tidak boleh dilakukan oleh satu orang pemberi bantuan hukum yang sama

B. Jenis-jenis, wewenang, tugas dan fungsi Lembaga Bantuan Hukum di Indonesia

1. Jenis-jenis Bantuan Hukum di Indonesia

a. Bantuan Hukum Konvensional

Bantuan Hukum Konvensional yaitu tanggung jawab moral maupun profesional para advokat, sifatnya individual, pasif, terbatas pada pendekatan formal/legal dan bentuk bantuan hukum berupa pendampingan kasus dan pembelaan di pengadilan.

b. Bantuan Hukum Konstitusional

Bantuan Hukum Konstitusional yaitu bantuan hukum untuk masyarakat miskin yang dilakukan dalam kerangka usaha-usaha dan tujuan yang lebih luas dari sekedar pelayanan hukum dipengadilan. Berorientasi pada perwujudan negara hukum yang berlandaskan prinsip-prinsip demokrasi dan HAM.

c. Bantuan Hukum Struktural

Bantuan hukum bukanlah sekedar pelembagaan pelayanan hukum untuk masyarakat miskin tetapi merupakan sebuah gerakan dan rangkaian tindakan guna pembebasan masyarakat dari belenggu struktur politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang sarat dengan penindasan. Adanya pengetahuan dan pemahaman masyarakat miskin tentang kepentingan-kepentingan bersama mereka. Adanya pengertian

bersama dikalangan masyarakat miskin tentang perlunya kepentingan-kepentingan mereka dilindungi oleh hukum. Adanya pengetahuan dan pemahaman dikalangan masyarakat miskin tentang hak-hak mereka yang telah diakui oleh hukum. Adanya kecakapan dan kemandirian dikalangan masyarakat miskin untuk mewujudkan hak-hak dan kepentingan-kepentingan mereka di dalam masyarakat.²⁶

2. Hak dan Kewajiban Lembaga Bantuan Hukum di Indonesia

Undang-Undang NO. 16 Tahun 2011 Bab IV pasal 9 tentang bantuan hukum menyebutkan penyelenggaraan bantuan hukum pemberi bantuan hukum berhak:

1. Melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum;
2. Melakukan pelayanan hukum
3. Menyenggarakan bantuan hukum, penyuluhan hukum, bantuan hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan bantuan hukum;
4. Menerima anggaran dari negara untuk melaksanakan bantuan hukum sesuai dengan undang-undang ini

²⁶ AusAID, YLBHI, PSHK, dan IALDF, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, (Jakarta; Yayasan Obor Indonesia, 2009), hlm.46

5. Mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Mendapatkan informasi dan data lain dari pemerintah atau instansi lain untuk kepentingan pembelaan perkara; dan
7. Mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian bantuan hukum.

Dalam kewajibannya sebagai pemberi bantuan hukum lembaga bantuan hukum sesuai dengan undang-undang No. 16 tahun 2011 bab IV pasal 10 tentang bantuan hukum menyebutkan penyelenggaraan bantuan hukum mewajibkan pemberi bantuan hukum untuk:

1. Melaporkan kepada menteri tentang program bantuan hukum
2. Melaporkan setiap penggunaan anggaran negara yang digunakan untuk pemberian bantuan hukum berdasarkan undang-undang ini.
3. Menyenggarakan pendidikan dan pelatihan bantuan hukum bagi advokat, paralegal, dosen, mahasiswa fakultas hukum yang direkrut sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf a;
4. Menjaga kerahasiaan data, informasi dan atau keterangan yang diperoleh dari penerima bantuan hukum berkaitan perkara yang sedang ditangani kecuali ditentukan lain oleh undang-undang; dan
5. Memberikan bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam undang-

undang ini sampai perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum.

Dalam menyelenggarakan fungsinya sebagai bantuan hukum, advokat dijamin legalitas dan independensinya oleh undang-undang. Hal ini seperti diatur dalam pasal 11 yang menyebutkan: “pemberi bantuan hukum tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam memberikan bantuan hukum sebagai tanggung jawabnya yang dilakukan dengan itikad baik yang dilakukan didalam maupun di luar sidang pengadilan sesuai standar etik advokat”.

3. Tugas dan Fungsi Lembaga Bantuan Hukum di Indonesia

Adnan Buyung Nasution mengatakan bahwa disamping memberikan pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat yang membutuhkannya, lembaga bantuan hukum berambisi untuk mendidik masyarakat dalam arti yang seluas-luasnya dengan tujuan menumbuhkan dan membina kesadaran akan hak-hak sebagai subjek hukum. Lembaga bantuan hukum juga berambisi turut serta mengadakan pembaharuan hukum dan perbaikan pelaksanaan hukum disegala bidang.

Ketiga tujuan lembaga hukum tersebut merupakan suatu kesatuan yang bulat yang hendak dicapai oleh lembaga bantuan hukum dalam rangka pembangunan nasional.²⁷

Berdasarkan Undang-Undang Bantuan Hukum No. 16 Tahun 2011 Pasal 6 ayat 2, memberikan tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan Bantuan Hukum
- b. Menyusun dan menetapkan standar Bantuan Hukum berdasarkan asas-asas pemberi bantuan hukum
- c. Menyusun anggaran bantuan hukum
- d. Mengelola bantuan hukum secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel
- e. Menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan bantuan hukum kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada setiap akhir tahun anggaran

Mengenai fungsi Lembaga Bantuan Hukum sebagai berikut:

- a. *Public service*

Sehubungan dengan kondisi sosial ekonomis karena sebagian besar dari masyarakat kita tergolong tidak mampu atau kurang mampu

²⁷ Wagianto, *Peran dan Fungsi Lembaga Arbitrase Syariah Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan*, (Calina Media dan Arti Bumi Intaran, 2017), Hlm 228

untuk menggunakan dan membayar jasa advokat, maka Lembaga Bantuan Hukum memberikan jasa-jasanya dengan cuma-cuma.

b. *Social Aducation*

Sehubungan dengan kondisi sosial ultural, dimana lembaga dengan suatu perencanaan yang matang dan sistematis serta metode kerja yang praktis harus memberikan penerangan-penerangan dan petunjuk-petunjuk untuk mendidik masyarakat agar lebih sadar dan mengerti hak-hak dan kewajiban-kewajibannya menurut hukum

c. Perbaikan tertib hukum

Sehubungan dengan kondisi politik, dimana peranan lembaga tidak hanya terbatas pada perbaikan-perbaikan di bidang peradilan pada umumnya pada profesi pembelaan khususnya, akan tetapi partisipasi masyarakat dalam bentuk kontrol dengan kritik-kritik dan saran-saran nya untuk memperbaiki kepincangan-kepincangan/mengoreksi tindakan-tindakan penguasa yang merugikan masyarakat

d. Pembaharuan hukum

Pengalaman-pengalaman praktis dalam melaksanakan fungsinya ditemukan banyak sekali peraturan-peraturan hukum yang sudah usang tidak memenuhi kebutuhan baru, bahkan kadang-kadang bertentangan atau menghambat perkembangan keadaan.

e. Pembukaan lapangan kerja

Berdasarkan kenyataan bahwa dewasa ini terdapat banyak pengangguran sarjana-sarjana hukum yang tidak atau belum dimanfaatkan atau dikerahkan pada pekerjaan-pekerjaan yang relevan dengan bidangnya dalam rangka pembangunan nasional.

f. *Practical Training*

Mendekatkan diri dan menjaga hubungan baik antara Lembaga Bantuan Hukum dengan setrum ilmu pengetahuan adalah kerja sama dengan fakultas-fakultas hukum. Kerja sama ini dapat memberikan keuntungan kepada kedua belah pihak. Bagi fakultas-fakultas hukum dapat menjadikan sarana latihan praktik bagi mahasiswa-mahasiswa hukum dalam rangka mempersiapkan diri dimana dapat menguji teori-teori yang dipelajari dengan kenyataan-kenyataan dan kebutuhan-kebutuhan dalam praktik serta pengalaman. Bagi Lembaga Bantuan hukum, kerja sama tersebut di harapkan akan membawa efek turut membantu menjaga idealisme lembaga disamping memperoleh sumbangan-sumbangan pikiran dan saran-saran.

Pekerjaan penasihat hukum adalah pekerjaan kepercayaan. Ia harus menyimpan rahasia dari klien serta informasi yang diberikan kepadanya, pemberitahuan yang konfindensial dan sumber berita. Karena pekerjaan penasihat hukum mempunyai sifat mulia dan luhur, maka jika datang seorang yang tidak mampu dan miskin untuk meminta pertolongan hukum

serta tidak mampu membayar honorarium maka penasehat hukum berkewajiban untuk memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma.

Seseorang yang menjalankan profesi hukum pada umumnya harus mempunyai budi yang luhur dan mulia, serta menjalankan profesi atas dasar kejujuran, serta bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Lembaga Bantuan Hukum memiliki tugas yang sangat penting dalam proses penegakan hukum. Mereka akan mengirimkan seorang advokat yang akan membantu serta mendampingi pihak yang berperkara di pengadilan. Advokat akan memberikan pelayanan kepada orang berperkara tersebut sehingga di dalam proses persidangan orang tersebut bisa benar-benar dijamin hak-haknya. Tugas lain dari sebuah lembaga bantuan hukum adalah memberikan pendidikan kepada masyarakat berupa penyuluhan.



C. Mekanisme Dalam Pemberian Bantuan Hukum di Indonesia

Untuk memberikan kontrol terhadap pemberi bantuan hukum dalam melaksanakan pelayanan bagi penerima bantuan hukum sehingga dapat berjalan selaras dan tertib maka di dalam undang-undang No. 16 tahun 2011 bab VI pasal 14 menyebutkan syarat pemberian bantuan hukum sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh bantuan hukum, pemohon bantuan hukum harus memenuhi syarat-syarat:

- a. Mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat tentang persoalan yang dimohonkan bantuan hukum
- b. Menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan
- c. Melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat setingkat ditempat tinggal pemohon bantuan hukum

Dalam hal pemohon bantuan hukum tidak mampu mengajukan permohonan secara tertulis.

Pasal 15

1. Pemohon bantuan hukum mengajukan permohonan bantuan hukum kepada pemberi bantuan hukum.
2. Pemberi bantuan hukum dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan bantuan hukum dinyatakan lengkap harus memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan bantuan hukum.
3. Dalam permohonan bantuan hukum diterima, pemberi bantuan hukum memberi bantuan hukum sesuai surat kuasa khusus dari penerima bantuan hukum.
4. Dalam hal permohonan bantuan hukum ditolak, pemberi bantuan hukum mencantumkan alasan penolakan.

Pasal 16

1. Pendanaan bantuan hukum yang diperlukan dan digunakan untuk penyelenggaraan bantuan hukum sesuai dengan undang-undang ini dibebankan pada anggaran pendapatan belanja Negara
2. Selain pendanaan sebagaimana dimaksud ayat (1), sumber pendanaan bantuan hukum dapat berasal dari
 - a. Hibah atau sumbangan; dan/atau
 - b. Sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat

Pasal 17

1. Pemerintah wajib mengalokasikan dan penyelenggaraan bantuan hukum dalam anggaran pendapatan dan belanja Negara
2. Pendanaan penyelenggaraan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dialokasikan pada anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dan hak asasi manusia

Pasal 19

1. Daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan bantuan hukum dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah.²⁸

²⁸ UU Nomor 16 tahun 2011 Tentang bantuan hukum

D. Lembaga Bantuan Hukum Dalam Perspektif Hukum Islam

1. Peran Lembaga Bantuan Hukum dalam Islam

Konsep bantuan hukum berkaitan erat dengan ketentuan hukum Islam yang mengajarkan kepada para pemeluknya agar melindungi hak-hak hukum setiap individu, bahwa setiap orang sama kedudukannya di depan hukum dan adanya suatu kewajiban menegakkan hukum dan keadilan bagi setiap individu. Bantuan hukum sebagai salah satu perwujudan dari tercapainya peradilan yang adil dan tidak memihak.

Ketentuan hukum Islam tersebut menjadi dasar yang paling fundamental bagi adanya bantuan hukum dalam proses penegakan hukum Islam. Bantuan hukum dalam istilah literature hukum Islam dikenal dengan istilah *al-mahamy*.²⁹ Bantuan hukum dalam Islam dikenal dengan istilah kuasa hukum. Dimana kuasa hukum dalam bahasa Arabnya disebut *al-wakalah fi al-khusumah*. Menurut Sayyid Sabiq, *al wakalah* adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada yang lain dalam hal-hal yang dapat diwakilkan.

Pengertian *wakalah* secara etimologis adalah penjagaan, jaminan, tanggungan, pemberian kuasa. Dan juga akad *wakalah* bisa di artikan pelimpahan kekuasaan oleh seseorang sebagai pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua dalam hal-hal yang diwakilkan (dalam hal ini pihak kedua) hanya melaksanakan sesuatu sebatas kuasa atau

²⁹ Didi kurnadi, *Bantuan Hukum dalam Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm. 29

wewenang yang diberikan oleh pihak pertama, namun, apabila kuasa itu telah dilaksanakan sesuai yang disyaratkan, maka semua resiko dan tanggung jawab atas dilaksanakan perintah tersebut sepenuhnya menjadi pihak pertama atau pemberian kuasa.³⁰

Pemberian kuasa hukum atau perwakilan dalam bidang hukum penekanannya adalah pada bidang hukum penekanannya adalah pada penunjukan seseorang agar melaksanakan suatu kewajiban. Dalam bidang hukum dalam arti sempit, perwakilan bertujuan untuk memberikan kuasa kepada orang lain untuk menyelesaikan (*wakalah*, perwakilan; *muwakil*, yang mewakilkan; *wakil* yang mewakili urusan hukum).

Orang yang mewakili, dengan demikian terikat oleh perintah ini dan fungsinya mendekati fungsi utusan, ini memungkinkan untuk menunjuk orang-orang yang tidak memiliki kecakapan hukum secara penuh. *Wakalah* dalam peribadatan tidak sah, akan tetapi *wakalah* dalam Hukum Islam seperti memberi bantuan hukum untuk menjadi wakil dalam suatu urusan adalah boleh.³¹

Secara etimologis pengertian bantuan hukum dan pengacara/advokat dalam sejarah hukum Islam dapat dilihat dari dua aspek. *Pertama*, bantuan hukum merupakan suatu jasa hukum atau profesi hukum yang ditunjukkan untuk menegakkan hukum dan atau membantu

³⁰ Abdul Wahab Ibrahim Abu sulaiman, *Banking Cards Syariah Kartu Kredit dan Debit dalam Perspektif Fiqih* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2006), hlm 164

³¹ Wagianto, *Opcit*, Hlm 213

klien untuk mendapatkan keadilan di depan hukum. *Kedua*, istilah *mahamy*, *hakam*, *mufi* dan *mushalaih alaih* hampir setara kedudukannya dengan profesi advokat dan pengacara dalam memberikan jasa konsultasi hukum atau penasehat hukum yang berperan sebagai pemberi jasa hukum. Jasa hukum yang diberikan dapat berupa konsultasi hukum, menjalankan kuasa hukum, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain bagi klien untuk menyelesaikan perselisihan, mendamaikan sengketa atau memberikan nasehat atau *advise* kepada para pihak agar masing-masing melaksanakan kewajiban dan mengembalikan haknya kepada pihak lain secara sah (*legal*) dan sukarela (*ishlah*).

Substansi bantuan hukum dalam Islam pada masa Umar bin Khattab (632-644M), pada masa Umar berkuasa, ia pernah memberikan bantuan hukum kepada orang miskin yang mencuri. Pada waktu itu Umar berpendapat bahwa orang miskin yang mencuri tidak perlu dipotong tangan sebagaimana firman Allah yang menyebutkan bahwa laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa Lagi Maha Bijaksana.

Hal ini Umar bin Khattab memberikan bantuan hukum kepada pelaku pencurian dengan berpendapat bahwa si pencuri tidak perlu dihukum potong tangan. Alasan hukum yang disampaikan oleh Umar bahwa saat ini bangsa kita dilanda musibah, yang disebut *'am al ramada*

(musim kemarau panjang yang mengakibatkan tanah gersang sehingga rakyat kesulitan mencari makan). Kasus ini terjadi menjelang tahun 18 Hijriyah, dimana tanah-tanah menjadi gersang seperti hi Hijaz, Tihama dan Najd. Tindakan Khalifah Umar bin Khattab inilah yang dalam hukum Islam dimaksudkan sebagai bantuan hukum.

Menurut Islam, seseorang diperkenankan mendelegasikan suatu tindakan tertentu kepada orang lain yang mana orang lain tersebut bertindak atas nama pemberi kuasa atau yang mewakilkan sepanjang kegiatan yang didelegasikan diperkenankan oleh agama.

Selain itu, dalam konsep hukum Islam manusia kedudukannya sama di depan hukum dan berhak mendapatkan jaminan keadilan. Dari konsep itu, pemenuhan hak dan kewajiban hukum menjadi tujuan keadilan hukum. Akan tetapi yang perlu digaris bawahi adalah otoritas pembuat hukum mutlak di tangan Allah SWT, sedangkan penguasa dan rakyat diberi amanat untuk menyelesaikan urusan-urusan publik bersumber pada wahyu dan selebihnya ditentukan oleh manusia sendiri melalui ijtihad berdasarkan prinsip musyawarah.

Dasar hukum adanya pemberian kuasa hukum dalam berperkara tercakup dalam dasar hukum perwakilan secara umum, antara lain dalam QS an-nisa' ayat 58

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨﴾

Artinya : “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat*”³²

Ath-Tahabri menafsirkan ayat tersebut bahwa ayat tersebut adalah seruan dari Tuhan kepada orang yang mengurus kekuasaan kaum muslimin dengan melaksanakan amanat kepada yang memberi tanggung jawab tersebut, dari kewajiban dan hak-haknya. Dan yang diamanatkan mereka kepada pemimpin untuk mengurus segala permasalahan, dan berjanji terhadap mereka untuk melakukan persamaan. Kemudian Ath-Tahabari menerangkan makna keadilan dengan mengatakan bahwa itulah hukum dari Tuhan yang telah diturunkan dalam Al-Qur'an dan diterangkan oleh Rasul-Nya, janganlah kalian melewati batasnya hingga dapat menganiaya.

Keadilan memiliki makna umum dan makna khusus, meliputi keadilan dalam bermuamalah, keadilan dalam hukum, keadilan dalam keuangan, keadilan dalam hak-hak manusia. Makna asli dari kata “adil” dalam tinjauan etimologinya berarti persamaan dalam bermuamalah. Secara tidak langsung seruan Islam pada prinsip keadilan dan berkonsekuensi melaksanakannya adalah menyeru pada “persamaan”.

³² Departemen Agama RI, *Op.Cit*, hlm 87

Persamaan yang dimaksud diantaranya adalah persamaan di hadapan hukum. Makna itulah yang ditegaskan dan dikhususkan oleh Abu Bakar ash-Shidiq r.a dalam sambutan pertamanya yang disampaikan setelah diba'iat menjadi khalifah.

Para pemikir Islam juga berbicara tentang keadilan dari aspek sosiologi politik. Mereka berpendapat bahwa keadilan seorang penguasa atau pejabat pemerintahan, dalam segala sesuatu yang berkaitan dengan hak manusia, atau hak-hak yang menjadi konsekuensi pekerjaannya akan membuat rakyatnya merasa aman dan tentram, meningkatkan etos kerja mereka, hingga meningkatkan dan mempercepat laju pembangunan, memperbanyak harta benda dan kebaikan.³³

Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia merupakan salah satu bentuk dari upaya penegakkan keadilan. Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) telah lama dikenal dalam Islam. Jika ditelaah lebih dalam, banyak ayat al-Qur'an, maupun As-Sunnah yang menjadi dasar bagi teori persamaan hak.

Ahli fiqh pada beberapa abad yang silam sudah membicarakan tentang bantuan hukum yang dikelompokkan kepada bab *wakalah* seperti yang telah dijelaskan di atas. *Wakalah* bisa diartikan pelimpahan kekuasaan oleh seseorang sebagai pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua dalam hal-hal yang diwakilkan (dalam hal ini pihak

³³ Dhiauddin Rais, *Teori Politik Islam*, (Jakarta, Gema Insani, 2001), hlm 269

kedua) hanya melaksanakan sesuatu sebatas kuasa atau wewenang yang diberikan sesuai yang disyaratkan, maka resiko dan tanggung jawab atas dilaksanakan perintah tersebut sepenuhnya menjadi pihak pertama atau pemberi kuasa.

Bantuan hukum dalam Al-Qur'an tidak disebutkan dengan jelas, namun pada dasarnya hukum Islam telah mengeluarkan pemikiran tentang bantuan hukum dan menerapkannya dalam pelaksanaan hukum Islam. Meskipun di antara mereka telah terjadi perselisihan pendapat, namun wujud bantuan hukum, mewakilkan atau mendelegasikan untuk bertindak hukum sudah ada pembicaraan panjang lebar bahkan sampai kepada pendelegasian mengenai kasus perdata dan pidana.

Disebutkan dalam AL-Qur'an mengenai istilah bantuan hukum, namun pada dasarnya hukum Islam telah mengeluarkan pemikiran tentang bantuan hukum dan menerapkannya dalam pelaksanaan hukum Islam. Pada kajian kitab-kitab fiqh banyak yang menyinggung soal peradilan (*al-qadha*), namun materinya tidak menyinggung tentang bantuan hukum. Bantuan hukum yang pelaksanaan yuridisnya dilakukan oleh *hukum* hanya dijumpai dalam bab *munakahat* (perkawinan). Pada hakekatnya yang menjadi dasar dalam penerapan bantuan hukum adalah prinsip-prinsip hukum Islam, salah satunya yakni prinsip keadilan atau persamaan, tolong menolong. Di dalam Al-Qur'an, karena pentingnya kedudukan dan fungsi kata, keadilan dan persamaan. Di dalam Al-Qur'an, karena pentingnya

kedudukan dan fungsi kata, keadilan disebut lebih dari 1000 kali, terbanyak setelah Allah dan ilmu pengetahuan. Banyak ayat-ayat yang memerintahkan manusia berlaku adil dan menegakkan keadilan.³⁴

Dalam *Ensiklopedia Hukum Islam* dikemukakan bahwa secara etimologi arti adil (*al-adl*) berarti tidak berat sebelah, tidak memihak atau menyamakan sesuatu dengan yang lain (*al-musawah*). Sedangkan adil secara termologis adalah mempersamakan sesuatu pada tempatnya (*wad 'asy-syai fi maqamih*).³⁵

Prinsip tolong menolong juga masuk dalam konsep Islam yang menjadi dasar bantuan hukum dalam Islam. Tolong menolong dalam bahasa Arabnya adalah *ta'awun* adalah sifat tolong menolong diantara sesama manusia dalam hal kebaikan dan takwa. Dalam ajaran Islam, tolong menolong merupakan kewajiban setiap muslim. Sudah semestinya konsep tolong menolong ini dikemas sesuai dengan syariat Islam, dalam artian tolong menolong hanya diperbolehkan dalam kebaikan dan takwa, dan tidak diperbolehkan tolong menolong dalam dosa atau permusuhan.

³⁴ A.M Saefudidin dalam Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 128-129

³⁵ Abdul Aziz Dahlan, et. Al (ed). *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 25

Allah SWT telah menyebutkan perintah tolong menolong dalam firmanNya Al-Maidah Ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ٢

Artinya : *“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”*³⁶

Ayat di atas menjelaskan bahwa kita diwajibkan untuk tolong menolong dalam kebaikan, dimana tugas Lembaga Bantuan Hukum pada dasarnya adalah untuk memberikan bantuan kepada pihak berperkara agar mendapatkan keadilan dalam penyelesaian atau penganan perkara yang terjadi.

2. Pemberi Jasa Hukum Dalam Perspektif Islam

Islam mewajibkan menegakkan hukum kepada umat manusia. Demikian besarnya kewajiban umat manusia dalam menegakkan kebenaran dan keadilan, dapat kita lihat dalam sejarah bahwa pada masa Rasulullah, banyak ulama yang menolak untuk diangkat menjadi penegak hukum (hakim), karena khawatir mereka tidak mampu berlaku adil dalam memberikan putusan bagi pihak-pihak yang bersengketa.³⁷ Dengan banyaknya penolakan ini mengakibatkan permasalahan yang muncul di

³⁶ Departemen Agama RI, hlm. 106

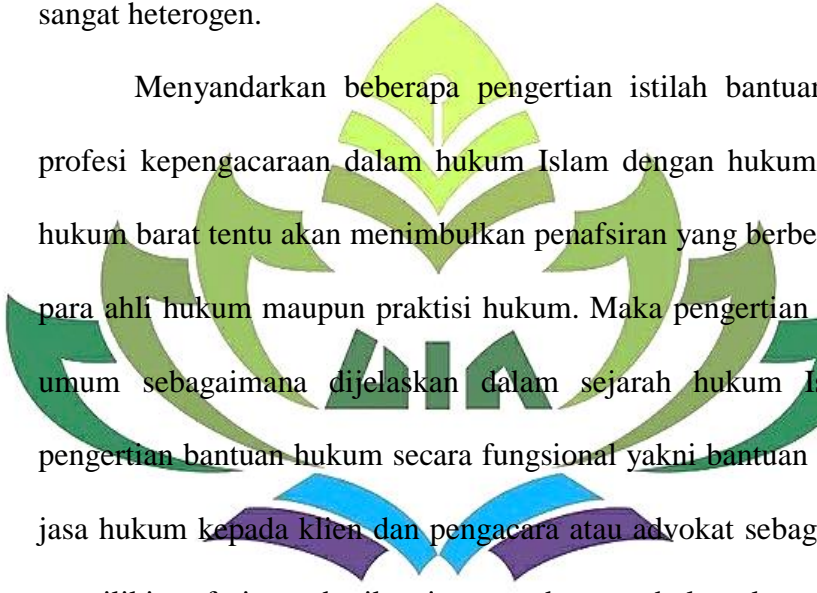
³⁷ Jurnal Al- 'Adalah No. 10 Tahun 2006, hlm. 43

tengah masyarakat tidak dapat diselesaikan, yang pada akhirnya dapat menimbulkan kekacauan.

Hukum Islam muncul dan berkembang dengan latar belakang politik dan administratif yang bervariasi. dalam hal ini kehidupan nabi adalah unik, kehidupan tersebut diikuti oleh periode kekhalifahan mandinah . hukum Islam adalah hukum suci yang diciptakan oleh sebuah proses irasional (wahyu) yang berkesinambungan, namun oleh suatu metode interpretasi (ijtihad) rasional yang diintrodusir kedalam pokok bahasan yang memberikan kerangka bagi strukturnya. Dalam masalah bantuan hukum, masyarakat harusnya mendapat kepastian akan hukum dan jaminan pelaksanaannya, oleh karena hukum dianggap suatu yang suci dan berasal dari wahyu yang diturunkan kepada nabi sebagai aturan dasar bagi manusia (*way of life*), maka pelaksanaan untuk memberi bantuan hukum bagi masyarakat memiliki masalah dalam Islam, dan hukum Islam adalah suatu kepastian, walaupun secara prosedural masih jarang ditemukan bagaimana pemberian bantuan hukum dalam Islam diterapkan di era modern.

Pentingnya melacak sejarah bantuan hukum Islam merupakan upaya dalam memperjelas konsep bantuan hukum Islam yang dipraktekan di jaman modern ini, jasa bantuan hukum menjadi bagian dari praktek penegakkan hukum Islam di peradilan agama atau tidak, jika bantuan hukum menjadi bagian di dalamnya, apakah bantuan hukum tersebut

dengan norma-norma penegakkan hukum Islam atau tidak, sebaliknya apabila tidak menjadi bagian didalamnya, apakah bantuan hukum tersebut dapat menjadi bagian penting dari proses penegakkan hukum Islam di peradilan agama, dan bagian proses penegakkan hukum Islam dapat dilaksanakan dalam praktik di peradilan agama. Dalam konstitusi negara Indonesia saat ini, persoalan agama Islam tidak bisa dipisahkan dari sistem politik, hukum, tradisi dan budaya masyarakat Indonesia yang sangat heterogen.



Menyandarkan beberapa pengertian istilah bantuan hukum dan profesi kepengacaraan dalam hukum Islam dengan hukum nasional dan hukum barat tentu akan menimbulkan penafsiran yang berbeda dikalangan para ahli hukum maupun praktisi hukum. Maka pengertian istilah hukum umum sebagaimana dijelaskan dalam sejarah hukum Islam dibatasi pengertian bantuan hukum secara fungsional yakni bantuan ukum sebagai jasa hukum kepada klien dan pengacara atau advokat sebagai orang yang memiliki profesi memberikan jasa atau bantuan hukum kepada klien.

Pada masa pra-Islam pemberian jasa hukum itu harus memenuhi beberapa kualifikasi. Diantaranya syarat yang penting bagi mereka adalah harus cakap dan memiliki kekuatan supranatural dan adikrodati. Atas dasar persyaratan tadi, pada umumnya pemberian jasa hukum itu terdiri atas ahli nujum. Karena itu dalam pemeriksaan dan penyelesaian persengketaan dikalangan mereka lebih banyak menggunakan kekuatan

firasat dari pada menghadirkan alat-alat bukti, seperti saksi atau pengakuan. Pada waktu itu mereka berpraktek di tempat itu. Dalam sejarah, gedung itu di bangun oleh Qusay bin Ka'ab. Pintu gedung itu sengaja diarahkan ke *Ka'bah*.³⁸

Pada waktu Islam datang dan berkembang yang di bawa oleh Nabi Muhammad SAW. Praktek pemberian jasa hukum terus berjalan dan dikembangkan sebagai alternatif penyelesaian sengketa dengan memodifikasi yang pernah berlaku pada masa para-Islam. Hal-hal yang bersifat takhayul dan syirik mulai di eliminir secara bertahap dan disesuaikan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Pada masa Rasulullah, ada seseorang yang memiliki ilmu agama cukup mendalam sehingga ia selalu menjadi rujukan bagi masyarakat sekitarnya untuk bertanya tentang sesuatu masalah yang berkaitan dengan kemasyarakatan. Ia selalu menjadi penengah dalam setiap sengketa umat dan setiap persoalan berhasil diselesaikannya secara islah. Perbuatannya ini yang dianggap baik dan dapat membantu menyelesaikan para pihak yang berselisih, maka Rasulullah memberikan pujian dan penghargaan kepadanya dengan dianugerahi nama Abu Syuraih, dan tidak lama kemudian diangkat menjadi hakim di suatu daerah. Dalam catatan sejarah Peradilan Islam, Abu Syuraih termasuk hakim yang di segani.

³⁸ Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini, *Advokat Dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm 36

Dari kisah diatas ditekankan bahwa dalam islam diwajibkannya penegakkan hukum, penegakkan keadilan di dalam masyarakat, sehingga dibutuhkan nya penegak hukum, pembela hukum untuk membantu masyarakat di dunia dalam menyelesaikan perkara dalam kehidupannya. Seperti yang di jelaskan oleh Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 135 :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوِّمِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللّٰهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلَوُّا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۝١٣٥﴾

Artinya : *“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha Mengetahui terhadap segala apa yang kamu kerjakan.”*³⁹

Makna adil menjadi hal yang sangat bijak dalam kehidupan manusia disebabkan karena adil menempatkan sesuatu pada tempatnya, makna adil ini jika dikaji lebih dalam sangatlah luas karena mencakup banyak hal sehingga adil bisa dikatakan sebagai pilar dan tiang kehidupan yang sudah tertulis dalam kitab suci Al-Qur'an yang berdiri di atas tiang yang kokoh. Islam datang adalah membawa keadilan, Islam tidak hanya mengatur bagaimana umat beribadah kepad Tuhannya saja akan tetapi ia

juga mengatur keseluruhan hidup manusia, bagaimana hubungan antar manusia (manusia dengan manusia) dan sekitarnya/lingkungan.

Agama Islam tidak hanya mengatur dunia saja akan tetapi juga jauh kedepan mengatur urusan akhirat yaitu pengadilan. Islam sebagai agama dan pandangan hidup yang komprehensif atau lengkap dapat ditunjukkan dengan ayat-ayat al-Qur'an yang apabila dikelompokkan akan megatur diantaranya aqidah, etika, akhlak, ibadah dan muamalah. Pilar Islam adalah aqidah, syariah dan akhlak.

Pada konsep Hukum Islam, manusia berkedudukan sama di depan hukum dan berhak mendapatkan jaminan keadilan. Dari konsep tersebut, pemenuhan hak dan kewajiban hukum menjadi tesis bagi tercapainya tujuan keadilan hukum itu sendiri. untuk menjamin persamaan hukum dan keadilan.

Pada dasarnya, konsep bantuan hukum (*the concept of legal aid*) atau (*legal service*) berkaitan erat dengan hukum Islam yang megajarkan kepada pemeluknya agar melindungi hak-hak hukum setiap individu dimana setiap orang sama kedudukannya didepan hukum, dan adanya suatu kewajiban menegakkan hukum dan keadilan bagi setiap individu.

Ketentuan hukum Islam tersebut menjadi dasar yang paling fundamental bagi adanya bantuan hukum dalam proses hukum Islam. Persoalan paling mendasar dari sangat sedikitnya literatur yang membahas

tentang bantuan hukum dalam Islam menyebabkan belum efektifnya bantuan hukum.

Bantuan hukum dalam literatur hukum Islam dikenal dengan istilah *al-mahany*. Kerangka filosofis konsep bantuan hukum berkaitan dengan teori penegakkan hukum dan teori HAM, teori bantuan hukum dalam Islam dan penegakkan hukum dalam HAM berakar dari tiga konsep; *pertama*, konsep tentang manusia (*mafhum al-insan*); *kedua*, konsep tentang hak dan kewajiban (*mafhum alhuquq wa alwafibat*) dan *ketiga*, konsep penegakkan hukum hak asasi manusia (*mafhum alhukm fi huquq al-insan*). Ketiga konsep tersebut diduga sangat mempengaruhi perbedaan konsep bantuan hukum dan penegakkan hukum dalam hukum Islam dan hukum barat.

Istilah bantuan hukum terkait dengan profesi advokat, dalam hukum Islam term advokat berasal dari bahasa arab, yakni *al-mahamy* yang setara maknanya dengan pengacara (*lawyer*). Dalam konteks bahasa arab pekerjaan advokat tersebut pula *al-mahammah* yang setara maknanya dengan kata *advocacy*. Sementara itu bantuan hukum dalam hukum Islam berasal dari teori persamaan hak hukum manusia yang didasarkan pada teori kehormatan manusia (*al-fitrah*). Secara alam dan hakiki (*fitrah*) setiap orang memiliki hak untuk bebas dalam harkat dan martabat. Teori ini dikemukakan oleh al-maudidi dalam *huma right in Islam* bahwa secara fitah setiap orang terlahir dalam kendaraan bebas dan sama dalam harkat

dan martabat” (*all human beings are born free and equal in dignity and right*).

Prinsip-prinsip persamaan hak dan penegakkan hukum dalam Islam bersumber pada al-Qur'an, sunnah dan ijtihad. Di antaranya dalam QS Al-Maidah ayat 2 dijelaskan kewajiban untuk saling tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Ayat ini menjadi dasar bagi adanya teori bantuan hukum dalam proses penegakkan hukum dan bantuan hukum dalam Islam. Dalam sejarah penegakkan hukum dalam Islam, pemenuhan hak hukum dan keadilan dapat dilakukan dalam tiga jasa hukum, yakni: *al-hakam*, *al-mufti*, dan *al-mushalih al-alaih* yang memiliki kesamaan fungsi dengan advokat, pengacara arbiter, konsultan atau penasihat hukum yang berperan memberikan jasa hukum.

Secara umum, fungsi mereka memberikan nasehat atau bantuan jasa hukum kepada para pihak agar saling melaksanakan kewajiban dan mengembalikan haknya kepada pihak lain secara *ishlah* dan *musyawarah* sebagaimana dalam QS *An-Nur* ayat 35 dan QS *Al-Hujurat* ayat 59. Dalam sejarah bantuan hukum dalam Islam istilah bantuan hukum (*legal aid* atau *legal service*) belum banyak dijelaskan, istilah *mahamy* juga dekat maknanya dengan peran kalangan penegak hukum di zaman awal perkembangan hukum Islam *hakam*, *mufti* dan *mushlaih alaih*. Misalnya pada masa awal sejarah Islam, nabi Muhammad SAW berpera menjadi *arbiter* dalam menyelesaikan sengketa dikalangan kaum Quraisy tentang

siapa yang paling berhak meletakkan batu hitam (*hajar al aswad*) di ka'bah. Saat itu ia mengusulkan agar orang yang pertama datang ke ka'bah lah yang paling berhak meletakkan *hajar al-aswad*, sehingga kelompok-kelompok suku Qiraisy yang berselisih itu bersepakat dengan usulan tersebut dan nabi diberi gelar orang yang dapat dipercaya *al amin*.⁴⁰

Perkembangan pemberian jasa hukum ini lebih berkembang pada masa pemerintahan Umar Bin Khattab yang mulai meimpahkan wewenang peradilan kepada pihak lain yang memiliki otoritas untuk itu. Lebih dari itu Umar ibn Khattab mulai membenahi lembaga peradilan untuk memulihkan kepercayaan umat terhadap lembaga peradilan.

Secara sosiologis, pemberian jasa hukum merupakan kebutuhan masyarakat untuk menyelesaikan perselisihan dalam masyarakat sekaligus menegakkan keadilan. Secara Yuridis, lahirnya Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 telah melegitimasi profesi advokat. Undang-undang ini memberikan otoritas profesional bagi advokat dalam memberikan pelayanan kepada publik sesuai dengan bidang keilmuannya.

Fungsi dan peranan utama seorang pemberi jasa bantuan hukum dalam mendampingi kliennya adalah agar masing-masing pihak terutama penegak hukum dapat bertindak sesuai dengan ketentuan hukum dan

⁴⁰ Wagianto, *Opcit*, Hlm 212

perundang-undangan yang berlaku.⁴¹ Artinya masing-masing pihak dapat bertindak sesuai dengan yang digariskan dalam hukum acara, sehingga masing-masing pihak dapat menikmati hak-haknya dan menjalankan kewajibannya yang digariskan oleh undang-undang.



⁴¹ Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini, *Opcit*, hlm. 46

BAB III

GAMBARAN UMUM LEMBAGA BANTUAN HUKUM DI DESA CIPADANG

A. Sejarah Desa Cipadang, Kec. Gedong Tataan, Kab. Pesawaran

Desa Cipadang dibuka pada tahun 1936 oleh kolonisasi yang berasal dari pulau Jawa. Penduduk kolonisasi pulau Jawa tersebut sebagian besar datang dari Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat yang dipimpin oleh ketua rombongan yaitu Bapak Ahmad Syahro. Dalam urutan kolonisasi Desa Cipadang termasuk Desa yang ke-18 di Kecamatan Gedong Tataan yang dibagi menjadi 4 kelompok yaitu: 13 polos, 13A, dan bedeng dua pulau.

Batas Desa Cipadang Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran ialah, Utara berbatasan dengan PTP Nusantara VII (Pesero) unit usaha Way Lima, Selatan berbatasan dengan Desa Pampangan dan Desa Way Layap Barat berbatasan dengan Desa Padangratu, Timur berbatasan dengan Desa Sukadadi.

Adapun urutan pemerintah Desa Cipadang dari tahun 1936 sampai dengan sekarang adalah sebagai berikut:

1. Cipadang 13 polos dengan pemerintahan adalah

Kamitua : Karyo Taruno

Carik : Marzuki

Kebayan : a. Dullah Syayuti

b. Ahmad Kaswan

Kaum : Ahmad Daman

Ili-iii : Kasijan

2. Cipadang 13A

Dengan pemerintahan adalah:

Kamitua : Wiryo Sengojo

Carik : Reso Sentono

Kebayan : a. Ali Umar

b. Dul Manan

Kaum : Ahmad Sarkowi

Ili-iii : Karworejo

3. Cipadang 13B dan Bedeg 20 dengan susunan pemerintahannya adalah:

Kamitua : Samoedimejo

Carik : Mardewo

Kebayan : Karyo Semeito

Kaum : Salbiah

Ili-iii : Sukino

Atas kebijaksanaan pemerintahan Belanda pada masa itu yang dipimpin oleh Kontrolitr Aswiran di Metro yang merubah sistem pemerintah desa Cipadang di tiga wilayah yang sudah ada menjadi satu wilayah pemerintahan desa. Pada masa kontrolitr pemerintahan Belanda menunjuk Ahmad Syahro'

sebagai kepala desa yang pertama yang ebrkedudukan di 13 polos dari tahun 1939 sampai tahun 1944. Tahun 1945 sampai dengan tahun 1949. Tahun 1945 sampai tahun 1949 kepala desa diduduki oleh Jokarso, sedangkan tahun 1950 sampai tahun 1979 kepala desa dipegang oleh Joyo Utomo yang pusat pemerintahannya berkedudukan di 13A.

Tahun 1980 sampai dengan tahun 1987 kepala desa diduduki oleh Kusno Sugianto, sedangkan pada tahun 1988 sampai dengan sekarang kepala desa diduduki oleh D.Kahono. dari kondisi yang ada, sebagian besar penduduk desa Cipadang berusaha disektor pertanian, khususnya lahan persawahan. Dari klasifikasi yang telah dicapai desa Cipadang termasuk tingkat desa swasembada. Adapun bidang-bidang yang sudah atau masih dilaksanakan di desa Cipadnag adalahs ebagai berikut:

1. Bidang Kependudukan

Penduduk desa Cipadang terdiri dari 759 kepala keluarga dengan jumlah penduduk 3659 jiwa pada tahun 1989. Jika dibandingkan dengan tingkat kenaikan penduduk Indonesia rata-rata kenaikan penduduk Cipadnag tergolong rendah. Hal itu dikarenakan program keluarga berencana sudah dapat dilaksanakan dengan baik oleh para penduduk secara sadar. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

TABEL 1. JUMLAH PENDUDUK MENURUT JENIS KELAMIN

Jenis Kelamin	1988	1989	Naik	Turun
Laki-laki	1849	1861	12	-
Perempuan	1768	1798	30	-
Jumlah	361	3659	42	-

Sumber: Data Monografi Desa Cipadang Tahun 1988-1989

TABEL 2. JUMLAH PENDUDUK MENURUT TINGKAT UMUR

Tingkat Umur	1988	1989	Naik	Turun
0-1	93	94	1	-
2-5	202	223	21	-
6-7	331	338	7	-
7-12	365	366	1	-
12-15	432	436	4	-
25-45	801	811	10	-
45-55	867	861	-	6
55	333	344	11	-
Ke-atas	193	189	-	7
Jumlah	3617	3659	139	1

Sumber: Data Monografi Desa Cipadang Tahun 1988-1989

2. Bidang Pendidikan

Bidang di Desa Cipadang sudah diklasifikasikan cukup baik, dimana seluruh penduduk telah bebas dari buta huruf dan buta tulis, namun dari kenyataan yang ada di Desa Cipadang sebagian besar tingkat pendidikan penduduknya hanya tamat SD atau tidak tamat SD. Sedangkan sarana pendidikan yang sudah dimiliki di Desa Cipadang baru pada tingkat SLTP negeri dan SLTA swasta.

Untuk lebih jelasnya banyak sarana yang ada di Desa Cipadang dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

TABEL 3. PENDUDUK MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN

Tingkat Pendidikan	1988	1989
Belum sekolah	521	346
Tidak sekolah	1023	1126
Tamat SD	1173	1188
Tamat SLTP	550	541
Tamat SLTA	300	406
Tamat Sarjana	50	52

Sumber : Data Monografi Desa Cipadang tahun 1988-1989

3. Bidang Pertanian

a. Penghasilan dan Pola Pertanian

Penduduk desa Cipadang melakukan usaha disektor pertanian sebagian besar pada lahan persawahan. Dari kondisi tersebut tampaknya padi merupakan pendapatan pokok dari pada penduduk di desa Cipadang. Dari hasil yang diperoleh rata-rata tiap hektar ± 5 ton gabah bersih. Sedangkan sistem pertanian yang digunakan oleh masyarakat sudah cukup maju dan berkembang pesat. Untuk lebih jelasnya maka banyak luas pertanian yang ada di tiap-tiap dusun dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

TABEL 4. LUAS LAHAN DAN GARAPAN PENDUDUK

No	Dusun	Luas Lahan
1	Dusun I	68,5 Ha
2	Dusun II	88,8 Ha
3	Dusun III	78,5 Ha
4	Dusun IV	83 Ha
5	Dusun V	68,5 Ha
Jumlah		387, 3 Ha

Sumber : Data Monografi Desa Cipadang tahun 1988-1989

b. Organisasi Petani atau Kelompok Tani

Untuk mengembangkan sektor pertanian, di Desa Cipadang telah terbentuk wadah kelompok tani di masing-masing dusun, yaitu

Dusun I dengan kelompok tani Krida Kismana, Dusun II dengan kelompok tani Panti Boga, Dusun III dengan kelompok tani Yoso Makmur, Dusun IV dengan kelompok tani Panca karya dan Dusun V dengan kelompok tani Bangun Karya. Untuk leboh jelas akan dirinci satu persatu keadaan kelompok tani yang ada di desa Cipadang sebagai berikut:

1) Kelompok Tani Krida Kisman dengan susunan pengurusnya adalah:

Ketua : Sugiman

Wakil Sekertaris : Wagiman

Sekertaris : Sutiman

Bendahara : Wahyudi

Adapun jumlah anggota kelompok Tani Krida Kisman sebanyak 102 kepala keluarga dan berkedudukan di dusun I 13 Polos. Dan sarana-saran yang telah dimiliki kelompok tani Krida Kisman adalah:

a) Luas area pertanian : 68,5 Ha

b) Gabah : 15 ton

c) Gerabatan

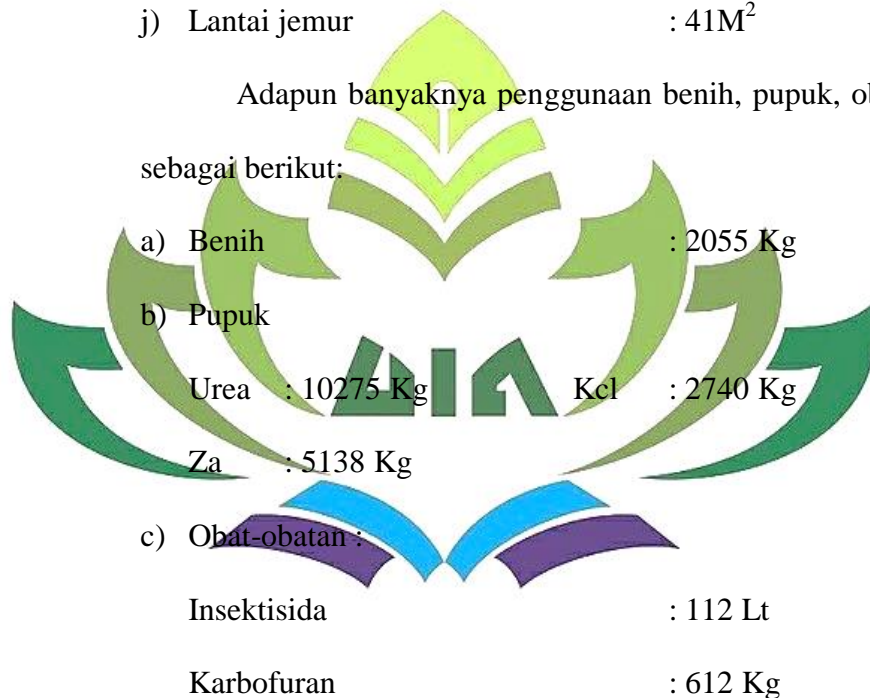
i. Piring : 300 buah

ii. Gelas : 200 buah

iii. Senduk : 200 buah

- iv. Rantang : 20 rakit
- d) Gubuk pertemuan : 1 buah
- e) Gudang pupuk : 2 buah
- f) Lumbung : 2 buah
- g) Hand Spreeyer : 30 buah
- h) Hand Tractor : 3 buah
- i) Pedal Treaser : 3 buah
- j) Lantai jemur : 41M²

Adapun banyaknya penggunaan benih, pupuk, obat-obatan sebagai berikut:



2) Kelompok Tani Pantai Boga yang berkedudukan di dusun II, sedangkan anggotanya berjumlah 136 kepala keluarga dengan susunan kepengurusan sebagai

Ketua : Idris

Sekretaris : R. Susanto

Bendahara : Cipto Suhardi

Adapun sarana-sarana yang dimiliki oleh kelompok tani pantai boga adalah:

- a) Luas area pertanian : 88,8 Ha
- b) Gabah : 5,5 ton
- c) Gerabatan
 - i. Piring : 120 buah
 - ii. Gelas : 120 buah
 - iii. Senduk : 144 buah
 - iv. Rantang : 15 rakit
- d) Lumbung : 1 buah
- e) Hand Spreeyer : 1 buah
- f) Hand Tractor : 12 buah
- g) Pedal Treaser : 2 buah
- h) Lantai jemur : 44 M²

Jumlah penggunaan benih, pupuk, obat-obatan dalam kelompok tani pantai Boga adalah :

- a) Benih : 3400 Kg
- b) Pupuk :
 - Urea : 5540 Kg
 - Za : 3250 Kg

Kcl : 3000 Kg

c) Obat-obatan :

Insektisida : 112 Lt

Karbofuran : 612 Kg

3) Kelompok Tani Krida Kisman dengan susunan pengurusnya adalah:

Ketua : Paidi Hs

Sekretaris : Cipto

Bendahara : Paijo

Adapun jumlah anggota kelompok Tani Krida Kisman sebanyak 83 kepala keluarga dan berkedudukan di dusun III. Jumlah sarana-saran yang telah dimiliki kelompok tani Krida Kisman adalah:

a) Luas area pertanian : 78,5 Ha

b) Gabah : 10 ton

c) Gerabatan

i. Piring : 700 buah

ii. Gelas : 600 buah

iii. Senduk : 700 buah

iv. Rantang : 20 rakit

d) Gubuk pertemuan : 1 buah

e) Gudang pupuk : 2 buah

- f) Lumbung : 2 buah
- g) Hand Spreyer : 30 buah
- h) Hand Tractor : 3 buah
- i) Pedal Treaser : 3 buah
- j) Lantai jemur : 79 M²

Adapun banyaknya penggunaan benih, pupuk, obat-obatan sebagai berikut:

- a) Benih : 20744 Kg

- b) Pupuk

Urea : 1075 Kg Kcl : 2740 Kg

Za : 5338 Kg

- c) Obat-obatan :

Insektisida : 50 Lt

Karbofuran : 512 Kg

- 4) Kelompok Tani Panca Karya dengan susunan pengurusnya adalah:

Ketua : Mishadi

Sekretaris : Sukijo

Bendahara : Tukiran

Adapun jumlah anggota kelompok Tani Krida Kisman sebanyak 84 kepala keluarga dan berkedudukan di dusun IV. Jumlah sarana-sarana yang telah dimiliki kelompok panca karya adalah :

- a) Luas area pertanian : 78,5 Ha
- b) Gabah : 16 ton
- c) Gerabatan
 - i. Piring : 310 buah
 - ii. Gelas : 204 buah
 - iii. Senduk : 202 buah
 - iv. Rantang : 20 rakit
- d) Gubuk pertemuan : 1 buah
- e) Gudang pupuk : 3 buah
- f) Lumbung : 2 buah
- g) Hand Spreeyer : 30 buah
- h) Hand Tractor : 3 buah
- i) Pedal Treaser : 3 buah
- j) Lantai jemur : 41M²



Adapun banyaknya penggunaan benih, pupuk, obat-obatan sebagai berikut:

- a) Benih : 2055 Kg
- b) Pupuk
 - Urea : 10275 Kg Kcl : 2740 Kg
 - Za : 5138 Kg
- c) Obat-obatan :
 - Insektisida : 112 Lt

Karbofuran : 612 Kg

5) Kelompok Tani Bangun karya, dengan susunan kepengurusannya adalah:

Ketua : Marsono

Sekretaris : Mislan B

Bendahara : Basikum

Adapun jumlah sarana-sarana yang dimiliki oleh kelompok

Tani bangun Karya adalah sebagai berikut:

a) Luas area pertanian : 78,5 Ha

b) Gabah : 10 ton

i. Gerabatan

ii. Piring : 300 buah

iii. Gelas : 100 buah

iv. Senduk : 200 buah

v. Rantang : 15 rakit

c) Gubuk pertemuan : 1 buah

d) Gudang pupuk : 1 buah

e) Lumbung : 2 buah

f) Hand Spreeyer : 20 buah

g) Hand Tractor : 4 buah

h) Pedal Treaser : 4 buah

i) Lantai jemur : 50 M²



Adapun banyaknya penggunaan benih, pupuk, obat-obatan sebagai berikut:

a) Benih : 720 Kg

b) Pupuk :

Urea : 10375 Kg

Za : 3138 Kg Kcl : 1740 Kg

c) Obat-obatan :

Insektisida : 45 Lt

Karbofuran : 612 Kg

c. Hasil Produksi Pertanian

Disamping produksi padi di desa Cipadang juga terdapat hasil produksi lain yang menjadi penghasilan tambahan bagi para petani, yang berupa singkong dan jagung. Untuk melihat produksi pertanian secara menyeluruh dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

TABEL 5. HASIL PRODUKSI PERTANIAN DAN JENISNYA

Jenis Produksi	1988	1989
Padi	4802,02 ton	6225,05 ton
Benih	1400 ton	1486 ton
Jagung	9 ton	10,5 ton
Singkong	170 ton	179 ton

Sumber : Data Monografi Desa Cipadang Tahun 1988-1989

4. Bidang kebudayaan dan Olahraga

Dalam masyarakat Cipadang kebudayaan yang berkembang lebih banyak dipengaruhi budaya masyarakat Jawa, karena kita ketahui dari sebagian besar penduduknya berasal dari pulau Jawa. Untuk lebih jelasnya maka sarana dan macam-macam kesenian yang ada di Desa Cipadang akan digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

TABEL 6. SARANA KESENIAN DAN ANGGOTANYA

No	Jenis Kesenian	Genap	Agt
1	Orkes Melayu	2	22 orang
2	Orkes Keroncong	1	14 orang
3	Orkes Gambus	2	27 orang
4	Mawalan	5	43 orang
5	Kerawitan anak	1	14 orang
6	Wayang Kulit	1	14 orang
7	Ketoprak	2	39 orang
8	Seni Tari	1	13 orang
9	Dekorasi Menghias	2	12 orang
10	Kemanten	4	2 orang
11	Seni Ukir	1	8 orang
12	Seni Lukis	1	15 orang
13	Teater	1	15 orang

Sumber : Data Monografi Desa Cipadang Tahun 1988-1989

Bidang-bidang olahraga yang berkembang di desa Cipadang adalah olahraga yang cukup sederhana dan mampu dibeli serta mudah didapat. Untuk lebih jelasnya cabang-cabang yang ada di desa Cipadang adalah dapat dilihat sebagai berikut:

TABEL 7. SARANA OLAHRAGA, JENIS DAN ANGGOTANYA

No.	Jenis Olahraga	Club	Anggotanya
1	Sepak bola	4	120 orang
2	Voly bali	15	410 orang
3	Bulu tangkis	8	140 orang
4	Tenis meja	8	110 orang
5	Brige	2	20 orang
6	Gaple	9	180 orang
7	Catur	9	100 orang

Sumber : Data Monografi Desa Cipadang tahun 1988-1989

5. Bidang-bidang organisasi sosial

- a. Karang Taruna : 15 kelompok – 2719 anggota
- b. Risma : 8 kelompok – 400 anggota
- c. Pemuda Kristen : 1 kelompok – 32 anggota
- d. AMPI : 1 kelompok – 27 anggota
- e. Kelompok Tani : 5 kelompok – 444 KK
- f. Kelompok Peguyuban : 1 kelompok – 25 orang

- g. Kel. Pecinta alam : 1 kelompok – 20 anggota
- h. Kelompok pengajian : 2 kelompok – 540 anggota

6. Bidang-bidang pembangunan sarana fisik

a. Sarana pendidikan

- 1) SD Impres : 3 unit dengan guru 48 orang dan murid 722 anak
- 2) SLTP : 4 unit dengan guru 109 orang dan murid 981 siswa
- 3) SLTA : 4 unit dengan guru 107 orang dan murid 214 siswa
- 4) TK : 2 unit dengan guru 30 orang dan murid 76 anak

b. Sarana perumahan yang terdiri dari:

- 1) Rumah tipe A : 485 buah
- 2) Rumah tipe B : 148 buah
- 3) Rumah tipe C : 42 buah

c. Sarana kesehatan masyarakat terdiri dari:

1) Sarana bersih terdiri dari:

- a) Sumur cincin : 579 buah
- b) Sumur tanpa cincin : 34 buah
- c) Jumlah mata air : 2 buah
- d) SPT dalam : 1 buah
- e) SPT dangkal : 7 buah

2) Sarana jamban keluarga terdiri dari:

- a) Jamban permanen : 610 buah
- b) Jamban cemplung : 62 buah

3) Pusat pelayanan kesehatan masyarakat terdiri dari:

- a) Puskesmas pembantu : 1 buah
- b) Pelayanan KB : 2 buah
- c) Posyandu : 2 buah

d. Saranan peribadatan yang terdiri dari:

- 1) Masjid dan mushollah : 11 buah
- 2) Gereja : 1 buah

e. Sarana jalan fisik desa terdiri dari:

- 1) Jalan anderlagh : 2 km
- 2) Jalan tanah : 15 km
- 3) Gorong-gorong : 75 km
- 4) Batas desa : 4 buah
- 5) Jalan aspal : 6 km
- 6) Talut jalan : 80 km
- 7) Jembatan : 4 buah

f. Sarana jalan dan fisik desa t erdiri dari:

- 1) Balai desa : 1 buah
- 2) Operation room : 1 buah
- 3) Pepustakaan : 1 buah
- 4) Kantor desa : 1 buah
- 5) Kantor PKK : 1 buah



g. Sarana pertanian yang terdiri dari:

- | | |
|-----------------------|-----------|
| 1) Tractor | : 13 buah |
| 2) Heler penggilingan | : 3 unit |
| 3) Lumbung | : 7 buah |
| 4) Gedung pupuk | : 6 buah |
| 5) Dam | : 2 buah |
| 6) Tempat pertemuan | : 5 buah |
| 7) KUD | : 1 buah |

h. Sarana transportasi yang terdiri dari:

- | | |
|-----------------|------------|
| 1) Mobil truck | : 8 buah |
| 2) Oplet | : 8 buah |
| 3) Sepeda motor | : 111 buah |
| 4) Sepeda | : 161 buah |
| 5) Becak | : 15 buah |

i. Sarana komunikasi yang terdiri dari:

- | | |
|-------------|------------|
| 1) Radio | : 132 buah |
| 2) Televisi | : 92 buah |

B. Sejarah Lembaga Bantuan Hukum Desa Cipadang

Pada awal tahun 2014 berdirilah sebuah kantor Lembaga Bantuan Hukum Desa Cipadang yang di pimpin oleh Posman Sibarani, S.H. kantor Lembaga Bantuan Hukum Desa Cipadang menjadi LBH pertama dan satu-

satunya di Desa Cipadang Kecamatan Gedong Tataan itu sendiri sampai saat ini.

Kantor Lembaga Bantuan Hukum Desa Cipadang pada hakikatnya belum memiliki bangunan sendiri atas nama pribadi. Bangunan yang digunakan hanyalah sebuah rumah yang mereka sewa sehingga memiliki batas waktu.⁴²

Kantor Lembaga Bantuan Hukum Desa Cipadang sudah mengalami empat kali perpindahan tempat. Kantor Lembaga Bantuan Hukum Desa Cipadang pertama kali terletak tepat di sebelah Balai Pekon Desa Cipadang. Hingga saat ini bangunan yang digunakan sebagai kantor Lembaga Bantuan Hukum Desa Cipadang terletak tidak jauh dari Komplek Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesawaran. Bangunan yang digunakan saat ini pun berbagi ruang dengan LSM Pemuda Desa Cipadang.

Posman Sibarani, S.H adalah pendiri Lembaga Bantuan Hukum Desa Cipadang, Posman mendirikan Lembaga Bantuan Hukum di desa Cipadang atas dasar keprihatinan Posman terhadap masyarakat Desa yang masih sangat awam terhadap kesadaran hukum.

⁴² Wawancara dengan Posman Sibarani, S.H Sebagai Advokat dan Ketua LBH Desa Cipadang (5 November 2018)

C. Visi Lembaga Bantuan Hukum Desa Cipadang

“Mencerdaskan dan membantu masyarakat Indonesia di bidang Hukum, sehingga masyarakat mendapatkan rasa keadilan, terlindungi sehingga tercipta masyarakat adil, makmur dan sejahtera”

D. Misi Lembaga Bantuan Hukum Desa Cipadang

1. Membangun masyarakat Indonesia menjadi masyarakat madani, mampu menanggulangi masalah-masalah hukum secara menyeluruh
2. Menjalankan fungsi bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu sebagai perwujudan cita-cita.

E. Struktur Organisasi Lembaga Bantuan Hukum Desa Cipadang

Dari awal berdirinya Lembaga Bantuan Hukum Desa Cipadang sampai sekarang, pemimpin LBH ini belum digantikan karena kurangnya Pengacara/Advokat yang berasal bahkan yang diluar dari Desa Cipadang yang ingin bergabung di Lembaga Bantuan Hukum Desa Cipadang.

Pengurus di Lembaga Bantuan Hukum Desa Cipadang pun hanya ada empat Pengacara/Advokat. Tidak adanya struktural khusus di Lembaga Bantuan Hukum Desa Cipadang menjadikan Lembaga Bantuan Hukum Desa Cipadang terkesan tidak terorganisasi bahkan cenderung pasif.

Pengacara/Advokat yang ikut bekerja sama di Lembaga Bantuan Hukum Desa Cipadang, sebagai berikut:

1. Posman Sibarani, S.H
2. Edwin Rahmatullah, S.H
3. Sandi Victory, S.H
4. Ridwan Budiman, S.H

F. Pembiayaan Lembaga Bantuan Hukum Desa Cipadang

Tujuan didirikannya Lembaga Bantuan Hukum Desa Cipadang oleh Posma Sibarani, S.H yaitu untuk membantu masyarakat yang kurang mampu dalam menyelesaikan sebuah perkara atau sengketa yang sedang di alami oleh masyarakat. Sehingga untuk pembiayaan dalam menjalankan Lembaga Bantuan Hukum itu sendiri di bebaskan kepada para Pengacara/Advokat yang berada di Lembaga Hukum Desa Cipadang. Tidak ada pemaksaan atau permintaan dari para pengacara untuk pembiayaan dalam menyelesaikan perkara yang mereka hadapi.

Selama empat tahun berdirinya Lembaga Bantuan Hukum Desa Cipadang, LBH ini belum pernah mendapatkan bantuan khusus dari pemerintahan di Desa Cipadang itu sendiri. Pemerintah setempat terkesan tidak begitu peduli dan ikut ambil bagian dalam kemajuan LBH Desa Cipadang, bahkan untuk masalah pembangunan tempat LBH ini pun terkesan di persulit dalam pengurusan ijin dan lain sebagainya.⁴³

⁴³ *Ibid.*

Dari data yang di dapat, mereka lebih sering mengeluarkan biaya sendiri dalam membantu penyelesaian perkara. Tidak ada biaya transportasi atau sekedar biaya makan yang dikeluarkan oleh yang berperkara, dan mereka pun tidak meminta, bahkan terkadang ada satu atau dua kasus yang justru mereka para advokat yang memberi mereka uang atau sekedar ongkos dikarenakan keadaan mereka yang memang kurang mampu.⁴⁴

G. Kinerja Lembaga Bantuan Hukum Desa Cipadang

Lembaga Bantuan Hukum Desa Cipadang memiliki visi dan misi yang menjadi pacuan dalam menjalankan Lembaga Bantuan Hukum yang mempunyai fungsi yang menyeluruh kepada seluruh masyarakat di desa Cipadang.

Lembaga Bantuan Hukum Desa Cipadang dalam satu tahun rata-rata kasus yang di selesaikan hanya ada 5 kasus. Kasus-kasus yang sering di tangani di LBH ini seperti, perlindungan anak, penculikan, dan penipuan. Yang termasuk pada kasus perlindungan dan penculikan lebih kepada kasus anak yang di nikahi tanpa persetujuan orag tua, sehingga pihak keluarga melaporkan kasus pernikahan ini ke dalam kategori perlindungan dan penculikan.

⁴⁴ Wawancara dengan Sandy Victory, S.H Sebagai Advokat di Lembaga Bantuan Hukum Desa Cipadang (5 November 2018)

Kurangnya sosialisai hukum yang dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum Desa Cipadang pun menjadi salah satu faktor tidak adanya pemahaman yang baik yang dimiliki masyarakat sekitar tentang fungsi dan tugas Lembaga Bantuan Hukum itu sendiri. Pemahaman masyarakat sekitar tentang bantuan hukum yang hanya akan mereka dapatkan jika memiliki uang menjadi salah satu ketakutan masyarakat sekitar untuk meminta bantuan hukum.

Di Desa Cipadang sendiri menurut data yang telah saya peroleh dalam peneltian, Lembaga Bantuan Hukum Desa Cipadang merupakan satu-satunya dan yang pertama berdiri di Desa Cipadang. Kurang nya pemahaman dari masyarakat sekitar, tidak adanya anak muda atau masyarakat di sekitar yang memiliki latar belakang studi hukum menjadikan desa Cipadang cukup tertinggal dari beberapa desa di sekitarnya.⁴⁵

Kelembagaan di Desa Cipadang pun tidak begitu terorganisir, kurang nya tenaga advokat/pemberi jasa bantuan hukum membuat LBH Desa Cipadang tidak memiliki struktur dalam pengurusan Lembaga Bantuan Hukum Desa Cipadang. Kurangnya perhatian dari pemerintah setempat pun membuat LBH Desa Cipadang kurang di lirik dan berjalan dengan baik.

Masyarakat sekitar lebih memilih penyelesaian secara adat dimana di dalam keputusan atau penyelesaian perkara di selesaikan oleh pemuka adat

⁴⁵ Wawancara dengan Narmin, *Kepala Desa, Desa Cipadang*, (5 November 2018)

sekitar.⁴⁶ Masyarakat sekitar hanya sekedar meminta nasehat atau masukan dari para pengacara dan untuk keputusan penyelesaian mereka lebih memilih menyelesaikan nya sendiri tanpa melibatkan hukum yang dimana dalam keputusan nya tidak jarang merugikan salah satu pihak saja.

Kasus penipuan pun mendapat persentase terendah dalam penanganan di LBH Desa Cipadang, penipuan yang di alami masyarakat sekitar lebih kepada perjanjian-perjanjian jual beli tanah antar masyarakat.

Dalam satu tahun penanganan kasus yang sampai ke pada meja pengadilan pun hampir tidak pernah. Sehingga dalam empat tahun berdirinya Lembaga Bantuan Hukum Desa Cipadang hanya ada 1 kasus yang sampai kepada tahap pengadilan, yaitu kasus sengketa jual beli tanah yang di alami oleh pak Nadiman (54 tahun), pak Nadiman telah melakukan perjanjian jual beli sebuah tanah kepada bapak Alex (46 tahun) pada tahun 2015. Setelah 2 tahun berlalu saat pak Nadiman ingin menjual kembali tanah tersebut diketahui bahwa tanah tersebut memiliki sertifikat ganda. Karena merasa dirugikan maka pak Nadiman meminta bantuan pada LBH desa Cipadang untuk mendampingi dalam proses hukum. Sebelum pendaftaran gugatan ke pengadilan, pak Nadiman dan pak Alex melakukan penyelesaian secara kekeluargaan yang di lakukan pada tanggal 21 Januari 2017. Namun pihak pak Alex tidak ingin menyelesaikan dan bertanggung jawab, hingga pada

⁴⁶ *Ibid*

tanggal 5 Februari 2017, pak Nadiman mendaftarkan gugatan ke pengadilan yang di dampingi oleh pengacara Posman Sibarani, S.H.

Pada tanggal 11 Februari 2017, pengadilan mengirimkan surat panggilan kepada masing-masing pihak, penggugat (Nadiman) dan tergugat (Alex). Tanggal 14 Februari 2017 sidang pertama, pihak penggugat dan tergugat datang dengan di dampingi kuasa hukum masing-masing, pihak tergugat dan penggugat saling menunjukkan bukti masing-masing. Sidang dilakukan sebanyak 2 kali, per tanggal 14 Februari dan tanggal 21 Februari 2017. Pada sidang putusan Majelis Hakim memutuskan bahwa pihak penggugat memenangkan perkara tersebut.

H. Program Kerja Lembaga Bantuan Hukum Desa Cipadang

1. Advokasi hukum dan HAM

Advokasi hukum dan HAM adalah program utama dalam setiap lembaga bantuan hukum, pemberian jasa bantuan hukum kepada masyarakat yang memiliki perkara.

2. Pengembangan sumber daya hukum masyarakat

Pengembangan sumber daya hukum masyarakat merupakan salah satu program kerja yang sedang di galakkan di dalam Lembaga Bantuan Hukum Desa Cipadang.

3. Studi dan penelitian

Studi penelitian merupakan program kerja yang baru saja mulai dilaksanakan oleh Lembaga Bantuan Hukum Desa Cipadang.

I. Sosialisasi Hukum di Desa Cipadang Terkait Pemerintahan

Sosialisasi yang dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum Desa Cipadang bisa dikatakan hampir tidak ada kegiatan dalam mensosialisasikan peran LBH di masyarakat sekitar. Masyarakat sekitar yang sebagian besar nya bekerja sebagai petani dan wirasawasta, jam kerja yang tidak menentu, kurangnya minat dan rasa ingin tahu dari masyarakat serta kurangnya para tenaga pemberi bantuan hukum memaksa LBH Desa Cipadang terkesan pasif dan tidak berfungsi dengan baik. Dari empat advokat yang berada di Lembaga Bantuan Hukum Desa Cipadang tiga di antara nya memiliki tempat pekerjaan lain, sehingga Lembaga Bantuan Hukum Desa Cipadang pun sehari-hari nya terlihat sepi, jika ada warga yang ingin berkonsultasi perkara mereka akan menghubungi melalui para anggota LSM yang berada di kantor, karena kantor LBH Desa Cipadang satu tempat dengan LSM Pemuda Cipadang.

Menurut pernyataan ibu Puji, salah satu warga di sekitar LBH Desa Cipadang yang berhasil saya wawancarai, para advokat di LBH tersebut memang tidak begitu aktif dalam memberikan sosialisasi hukum di masyarakat. Hanya saja ada beberapa masyarakat yang memang sering berkonsultasi langsung masalah hukum, hanya sampai tahap konsultasi sangat jarang jika ada penyelesaian sampai ke pengadilan. Dan menurut penuturan

dari ibu Puji ketua LBH Posman Sibarani lah yang justru lebih sering terlihat aktif berinteraksi ke masyarakat, walaupun Posman Sibarani lebih sering di Jakarta tapi jika ada yang ingin berkonsultasi dia siap untuk ditemui.

Peran LBH justru lebih dimanfaatkan oleh berbagai LSM yang berada di daerah Desa Cipadang sendiri. kegiatan para advokat lainnya yang berada di LBH Desa Cipadang lebih di habiskan dalam penyelesaian yang dihadapkan oleh LSM setempat. Kegiatan seperti ini yang menjadi salah satu faktor pasif nya kegiatan LBH Desa Cipadang dan tidak berjalannya sosialisasi hukum dengan baik, karena para pemberi jasa bantuan hukum nya terfokus pada LSM yang memiliki perkara tersendiri.



BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG LEMBAGA BANTUAN HUKUM DALAM SOSIALISASI HUKUM DI DESA CIPADANG KECAMATAN GEDONG TATAAN KABUPATEN PESAWARAN

A. Analisis Peran Lembaga Bantuan Hukum Desa Cipadang

Pemberian jasa bantuan hukum kini menjadi salah satu kebutuhan dalam masyarakat, banyaknya profesi pemberi jasa bantuan hukum (advokat) pun menjadi salah satu faktor dibentuknya Lembaga Bantuan Hukum di tengah masyarakat. Kelembagaan ini pun diharapkan bisa menjadi jalan keluar bagi masyarakat banyak khususnya bagi masyarakat kurang mampu yang tidak begitu memahami sebuah proses hukum dan hukum itu sendiri dalam penyelesaian perkara di tengah masyarakat.

Undang-undang No. 16 Tahun 2011 Bab IV pasal 9 tentang bantuan hukum menyebutkan penyelenggaraan bantuan hukum pemberi bantuan hukum berhak:

1. Melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum;
2. Melakukan pelayanan;
3. Menyelenggarakan bantuan hukum, penyuluhan hukum, bantuan hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan bantuan hukum;

4. Menerima anggaran dari negara untuk melaksanakan bantuan hukum sesuai dengan undang-undang ini;
5. Mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Mendapatkan informasi dan data lain dari pemerintah atau instansi lain untuk kepentingan pembelaan perkara; dan
7. Mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian bantuan hukum.

Data di atas, Negara Indonesia telah mengatur tentang hak seluruh warga negara Indonesia dalam mendapatkan keadilan di mata hukum. Masyarakat berhak mendapatkan bantuan hukum dalam penyelesaian perkara. Jaminan yang kuat telah diberikan oleh negara terhadap masyarakat, sehingga diharapkan tidak ada lagi diskriminasi dalam memberikan keadilan.

Kegiatan bantuan hukum khususnya bagi masyarakat miskin dan buta hukum yang tampak semakin meluas dan memasyarakat, suatu pandangan kritis terhadap konsep-konsep bantuan hukum yang kini dikembangkan di Indonesia banyak dikemukakan oleh kalangan hukum, baik teoritis, praktisi, maupun kalangan ilmuwan sosial. Bantuan hukum merupakan salah satu cara untuk pemerataan keadilan yang penting artinya bagi pembangunan hukum.

Seseorang terkena musibah berperkara, orang tersebut konsentrasinya terpecah-pecah atau bercabang-cabang, serta seringkali menunjukkan sifat

emosional yang menonjol dari pada ketenangan. Akibatnya, seseorang tidak dapat berfikir secara rasional lagi. Banyak orang pandai, dan memiliki keahlian dalam bidang hukum, jika ia terkena musibah berperkara masih tetap membutuhkan penasehat hukum. Sebagai pengakuan hak individu (*individual right*), prinsip persamaan dihadapan hukum (*equality before the law*) dijamin dalam sistem hukum Indonesia. Persamaan ini tidak mengenal pengecualian.

Cara-cara pemerintah atau negara campur tangan berpengaruh terhadap realisasi tujuan bantuan hukum, yakni perlindungan hukum yang merata, sehingga timbul dua model (sistem) bantuan hukum, yakni yuridis-individual dan model kesejahteraan. Pada model yuridis-individual masih terdapat ciri-ciri pola klasik dari bantuan hukum. Artinya permintaan akan bantuan hukum atau perlindungan hukum tergantung pada warga masyarakat yang memerlukannya. Warga masyarakat yang memerlukan bantuan hukum menemui pengacara dan memberikan imbalan atas jasa-jasa yang diberikan dari negara.

Model kesejahteraan memandang bantuan hukum sebagian dari haluan sosial, misalnya untuk menetralisasikan ketidakpastian atau kemiskinan. Pada model ini dituntut campur tangan yang intensif dari negara dan pemerintah. Kewajiban-kewajiban negara atau pemerintah untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar warga masyarakat menimbulkan hak-hak tertentu, seperti bantuan hukum yang merupakan salah satu cara memenuhi hak-hak tersebut.

Salah satu tujuan bantuan hukum adalah mendukung pembangunan suatu sistem hukum nasional. Selain itu yang hendak dicapai ialah suatu rasa tanggung jawab yang lebih besar dari petugas-petugas birokrasi dalam melaksanakan fungsinya menegakkan pada masyarakat. Program bantuan hukum ditujukan untuk memperkuat profesi hukum, menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan maupun pertauran kesejahteraan sosial yang lebih efektif.

Garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1999-2004 mengatakan dengan tegas bahwa mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat untuk terciptanya kesadaran dan tegaknya negara hukum. Tujuan tersebut ialah agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya.

Kewajiban-kewajiban pemberi bantuan hukum yang harus dilaksanakan di masyarakat pun sudah dijelaskan dalam perundang-undangan, begitu pun hak masyarakat dalam menerima bantuan hukum untuk penyelesaian perkara dengan Cuma-Cuma sangat diutamakan oleh pemerintah.

Hanya saja dalam lapangan nya banyak yang tidak sesuai dengan teori-teori yang sudah dibuat oleh negara. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat khususnya masyarakat pedesaan, tidak adanya edukasi dini, kurangnya tenaga pemberi bantuan hukum yang di daerah-daerah kecil menjadi faktor utama kurang berjalannya peran bantuan hukum di masyarakat.

Banyak materi yang dijelaskan dalam undang-undang tidak dilaksanakan dengan baik, salah satunya adalah pembiayaan yang dijanjikan oleh pemerintah yang akan disalurkan kepada setiap Lembaga Bantuan Hukum tidak sepenuhnya didapat oleh para pemberi jasa bantuan hukum. Sehingga pemberi bantuan hukum lebih banyak mengeluarkan pendanaan pribadi dalam membantu penyelesaian perkara kepada masyarakat.

Keberadaan pemberi bantuan hukum atau advokat dalam menjalankan profesinya dan perannya sebagai *agent of law developmet* (agen pembangunan hukum) terlebih dapat menjadi *agent of law enculturation* (agen pembudayaan hukum bagi masyarakat) atau malah sebaliknya, cenderung menjadi *agent of law commercialization* (agen komersialisasi di bidang hukum).

Perilaku terakhir yang di jelaskan di atas lah yang sekarang sering terjadi dalam praktik di masyarakat, sehingga menjadikan LBH di desa lebih sedikit advokat yang berminat megabdi di LBH tersebut, karena masyarakat yang rata-rata kurang mampu, yang benar-benar hanya tangan kosong dalam meminta bantuan hukum kepada para advokat. Lebih mudah mencari LBH di perkotaan dari pada di desa-desa, seperti yang terjadi di LBH desa Cipadang yang hanya memiliki empat advokat.

Tenaga bantuan hukum di pedesaan pun tidak meningkat karena sebagian lebih memilih masuk atau mengabdikan di LBH yang ada di kota, karena beberapa pemberi jasa bantuan hukum masih menjadikan profesi

advokat sebagai mata pencaharian utama mereka sehingga belum banyak yang tergerak sepenuh hati nya untuk benar-benar membantu secara cuma-cuma.

Lembaga Bantuan Hukum Desa Cipadang pun tidak berjalan cukup baik sepanjang berdirinya lembaga tersebut. Kurang nya perhatian pemerintah sekitar, tidak ada antusias yang besar yang diberikan oleh masyarakat sekitar, dan kurangnya tenaga profesi advokat membuat LBH tersebut bisa dibilang pasif.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Peran Lembaga Bantuan Hukum

Konsep bantuan hukum dalam Islam mengajarkan kepada para pemeluknya agar melindungi hak-hak hukum setiap individu, bahwa setiap orang sama kedudukannya di depan hukum dan adanya suatu kewajiban menegakkan hukum dan keadilan bagi setiap individu. Bantuan hukum Islam dalam istilah literature hukum Islam dikenal dengan istilah *al-mahamy*. Pada hakekatnya yang menjadi dasar dalam penerapan bantuan hukum dalam Islam adalah prinsip-prinsip hukum Islam, yakni prinsip tolong menolong dan keadilan atau persamaan. Ahli fiqh pada beberapa abad yang silam sudah membicarakan tentang bantuan hukum yang dikelompokkan kepada bab *wakalah*.

Istilah bantuan hukum yang makna fungsinya dekat dengan advokat, pengacara, arbiter, konsultan atau penasihat hukum yang berperan memberikan jasa hukum juga bisa diartikan sebagai perwakilan, mewakilkan

(*wakalah*), secara jelas pernyataan melalui wakil tidak dibedakan secara tegas dengan perwakilan.

Wakalah bisa diartikan pelimpahan kekuasaan oleh seseorang sebagai pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua dalam hal-hal yang diwakilkan (dalam hal ini pihak kedua) hanya melaksanakan sesuatu sebatas kuasa atau wewenang yang diberikan sesuai yang disyaratkan, maka resiko dan tanggung jawab atas dilaksanakan perintah tersebut sepenuhnya menjadi pihak pertama atau pemberi kuasa. Bantuan hukum dalam Al-Qur'an tidak disebutkan dengan jelas, namun pada dasarnya hukum Islam telah mengeluarkan pemikiran tentang bantuan hukum dan menerapkannya dalam pelaksanaan hukum Islam. Pada kajian kitab-kitab fiqh banyak yang menyinggung soal peradilan (*al-qadhal*), namun materinya tidak menyinggung tentang bantuan hukum.

Bantuan hukum dalam Islam sangat jelas bahwa bertujuan untuk kemaslahatan, keadilan dan tolong menolong sangat dianjurkan dalam bermasyarakat. Tidak adanya kesadaran di masyarakat, kurang nya kepedulian, dan kurang nya tanggung jawab dalam menjalankan kebijakan-kebijakan yang ada membuat semua nya menjadi sia-sia.

Ajaran Islam tentang penataan hukum memberi gambaran, bagaimana sesungguhnya Islam telah menata kehidupan manusia ini dengan hukum-hukum yang telah ditetapkan. Teori ajaran tentang penataan hukum menurut perspektif Islam bersumber dari Allah sebagai pencipta syariat dalam bentuk

wahyu, yaitu Al-Qur'an. Pandangan Islam tentang kedudukan bantuan hukum memposisikan pemberi bantuan hukum itu sejajar dengan penegak hukum yaitu hakim. Hal ini sesuai dengan undang-undang advokat nomor 18 tahun 2003 pasal 5 yang menyatakan bahwa kedudukan advokat setara dengan penegak hukum lainnya.

Pelaksanaan bantuan hukum dalam Islam tentu saja disandarkan pada prinsip-prinsip dan asas-asas hukum yang Islam yang bersumber pada al-Quran dan sunnah, maka bantuan hukum dan kepengacaraan dalam proses penegakan hukum Islam hendaknya ditujukan untuk keadilan, kebaikan, dan kemaslahatan umat manusia itu sendiri.

Melihat dari pandangan Islam terkait kedudukan bantuan hukum maka seharusnya menjadi titik tekan dalam aturan perundang-undangan adalah bagaimana memperketat proses pengangkatan seorang advokat atau pemberi bantuan hukum. Islam mengajarkan untuk senantiasa meningkatkan kualitas moral dari setiap manusia demi terciptanya kehidupan yang harmonis.

Prinsip keadilan dan persamaan, tolong menolong, menjadi dasar dan tujuan adanya bantuan hukum dalam Islam. Setiap manusia diwajibkan dalam tolong menolong dalam kebaikan, sehingga pemberian bantuan hukum diharapkan dapat menolong sesama manusia khususnya bagi masyarakat kurang mampu dalam penyelesaian perkara. Prinsip keadilan pun menjadi hal yang utama dalam peran LBH sebagai pemberi jasa bantuan hukum dalam Islam. Sedangkan dalam bentuk perjanjian atau kesepakatan antara pemberi

jasa bantuan hukum dan penerima bantuan hukum, dalam Islam di sebut *wakalah*.

Semua yang dijelaskan dalam Undang-undang bantuan hukum bahwasannya kedudukan bantuan hukum dan lembaga bantuan hukum sudah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, dimana tujuan bantuan hukum adalah untuk membantu menyelesaikan perkara dengan adil, mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi. Berdasarkan uraian dari bab ke bab yang telah dipaparkan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Lembaga Bantuan Hukum di Desa Cipadang pada kenyataannya tidak berjalan dengan baik. Seperti yang diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 salah satunya mengatur hak dan kewajiban LBH agar terciptanya sistem kelembagaan yang baik dan dapat terwujudnya tujuan utama didirikannya LBH dalam masyarakat. Tidak adanya dukungan yang baik dari pemerintah membuat para pemberi jasa bantuan hukum di LBH tersebut harus menanggung sendiri setiap pembiayaan yang terjadi di LBH tersebut. Peran LBH Desa Cipadang dalam mensosialisasikan hukum dalam masyarakat tidak terlaksana dengan baik, masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui keberadaan serta fungsi dari LBH itu sendiri. kurangnya tenaga pemberi jasa bantuan hukum di Lembaga Bantuan Hukum desa Cipadang pun menjadi salah satu faktor kuat tidak sempurnanya kelembagaan ini.

2. Pandangan Hukum Islam terhadap peran Lembaga Bantuan Hukum masuk dalam prinsip tolong menolong, dan persamaan keadilan. Pemberian jasa bantuan hukum kepada masyarakat diharapkan dapat menolong masyarakat khususnya masyarakat kurang mampu. LBH di desa Cipadang kurang berjalan menurut yang ditetapkan oleh UU No.16 Tahun 2011, oleh sebab itu seharusnya aparat pemegang kekuasaannya mengikuti anjurannya sebagaimana tertera dalam UU agar masyarakat mendapatkan pelayanan sebaik-baiknya sebagaimana yang tertera dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 2.

B. Saran

Sebagai akhir dari tulisan ini, penulis ingin memberikan saran untuk berbagai pihak dan para pembaca, sebagai berikut:

1. Kepada anggota Lembaga Bantuan Hukum diharapkan dapat lebih aktif dalam mensosialisasikan peranan-peranan Lembaga Bantuan Hukum dalam masyarakat, khususnya LBH di desa Cipadang Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran. Anggota LBH yang tidak mampu menjalankan tugas LBH agar menyerahkan amanah itu kepada orang lain. Melakukan kegiatan-kegiatan penyuluhan atau sosialisasi kepada pemuda-pemudi di Desa Cipadang melalui sekolah-sekolah yang berada di sekitaran Desa Cipadang atau di luar Desa Cipadang guna untuk membangkitkan rasa ingin tahu anak muda di Desa Cipadang.

2. Diharapkan kepada pemerintah untuk dapat memberikan kesempatan khusus pada Pengadilan Agama mengambil peranan yang lebih besar dalam pengembangan Lembaga Bantuan Hukum. Mengutamakan lulusan-lulusan Hukum dari perguruan tinggi Islam yang mempelajari Hukum Islam lebih mendasar untuk ikut bersama mengembangkan keaktifan Lembaga Bantuan Hukum.



DAFTAR PUSTAKA

A. Kitab, Buku, Kamus

Abdul Aziz Dahlan, et. Al (ed). *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996)

Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. (Bandung PT. Citra Aditya Bhakti 2004)

Abdul Wahab Ibrahim Abu sulaiman, *Banking Cards Syariah Kartu Kredit dan Debit dalam Perspektif Fiqih* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2006),

Abdul Wahab Khalaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1994, cetakan keempat)

Abdurahman, *Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Cendana Press, 1983)

A.M Saefudidin dalam Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005)

Amir Syarifudin, *Ushl Fiqh*, (Jakarta, PT. Logos Wavana Ilmu, 1997)

AusAID, YLBHI, PSHK, dan IALDF, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, (Jakarta; Yayasan Obor Indonesia, 2009)

Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan hak Asasi Manusia*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2009)

Didi kusnadi, *Bantuan Hukum dalam Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012),

Dhiauddin Rais, *Teori Politik Islam*, (Jakarta, Gema Insani, 2001)

Jurnal Al- 'Adalah No. 10 Tahun 2006

Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Cetakan ketujuh, CV Mandar Maju, 1996)

Martiman Prodjhamidjojo, *Penasihat Hukum dan Bantuan Hukum di Indonesia, Latar Belakang dan Sejarahnya*, Ghalia Indonesia, 1987

Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontektualisasi, dontrin politik Islam*, (Jakarta, Pernada Media Group, 2014)

Mulyana, W Kusumah, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*. (Jakarta: PT Elex Media, 2000)

Pusat Bahasa Departemen Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka, Jakarta, 2003)

Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini, *Advokat Dalam Perspektif Islam dan Hukum*

Positif, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003)

Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta, Rineka Cipta)

Susiadi, *metodologi penelitian*, (Bandar Lampung, Pusat penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung 2015)

T. Mulya Lubis, *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural*, (Jakarta, LP3ES)

Wagianto, *Peran dan Fungsi Lembaga Arbitrase Syariah Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan*, (Calina Media dan Arti Bumi Intaran, 2017)

Zeni Yusarlis, *Tinjauan Hukum Islam tentang Praktek Tengkulak*, (Bandar Lampung IAIN RIL, 2015)

B. Kitab, Buku, Kamus

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal

56

Undang-Undang No. 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

C. Internet

Pasal 163 Indische Staatsregeling, diakses dari
http://id.wikipedia.org/wiki/Pasal_163_Indische_Staatsregeling, pada
tanggal 25 September 2018 pukul 19.52.

